

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Suara Merdeka merupakan surat kabar yang terbesar di Jawa Tengah yang mulai berdiri pada tanggal 11 Februari 1950. Sebagai surat kabar yang memiliki slogan: *Korannya Jawa Tengah*, Suara Merdeka telah berkomitmen untuk menjadi sumber informasi bagi masyarakat Jawa Tengah, yaitu dengan memberikan informasi yang akurat, terkini, dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan jurnalisme sensitif gender dalam artikel opini rubrik Perempuan, Suara Merdeka dinilai telah cukup mampu memberikan ruang khusus bagi perempuan.

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan peneliti, maka didapatkan hasil sebagai berikut, rubrik Perempuan yang berisi kombinasi kritik dan saran mencapai 33%, sedangkan untuk arah opini yang sering muncul dalam rubrik Perempuan adalah pro perempuan (67%), 25% arah opini netral dan 8% memiliki arah opini kontra.

Rubrik Perempuan banyak menampilkan artikel yang berisi kritik dan saran. Opini-opini yang terdapat dalam rubrik tersebut cenderung mengarah untuk pro perempuan. Tidak jarang, dalam rubrik tersebut terdapat kritik terhadap masyarakat, pemerintah, dan pada budaya yang ada, atas perlakuan mereka terhadap perempuan yang dianggap tidak adil. Kritik tersebut kemudian diimbangi dengan saran sebagai ungkapan kepedulian atas permasalahan tersebut

Dari hasil oleh data tersebut, dapat ditarik kesimpulan, opini dalam rubrik Perempuan termasuk opini yang sensitif gender. Hal ini dapat dilihat dari isi opini dan arah opini yang pro terhadap perempuan. Media yang sensitif gender tidak akan menyudutkan perempuan atau mendiskriminasikan perempuan dalam pemberitaannya. Rubrik Perempuan telah menjadi *wadah* bagi perempuan untuk menyuarakan keadilan dan perjuangan perempuan selama ini. Namun, Suara Merdeka perlu lebih konsisten karena peneliti masih menemukan beberapa artikel opini yang justru menyudutkan perempuan (8%). Suara Merdeka perlu lebih berhati-hati dalam menampilkan opini, sehingga rubrik Perempuan dapat menjadi tempat bagi pergerakan perempuan dan bukan sebaliknya.

Kemudian, dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan kemunculan kata-kata yang mengandung makna pronografi, *pornokitsch*, dan *veyourisme*. Dilihat dari hasil perhitungan di atas, sebagai jurnalisme yang sensitif gender, Suara Merdeka telah cukup menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan perempuan saat ini. Suara Merdeka cukup peka terhadap ketidakadilan yang banyak terjadi di masyarakat. Dan sebagai respon atas kepekaan mereka terhadap sensitif gender, maka rubrik Perempuan ini telah menjadi ruang khusus untuk mengungkapkan perjuangan perempuan.

Namun, sebagai rubrik yang sensitif gender, Suara Merdeka perlu memperhatikan penggunaan bahasa dalam penulisan artikel opini tersebut. Peneliti masih menemukan penggunaan kata-kata yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah dan dikuasai oleh laki-laki (seksisme simbolik) sebanyak 33%. Beberapa artikel dalam Rubrik Perempuan masih

ditemukan kata-kata seperti “perempuan sebagai bumbu penyedap”, “tokoh pendamping”, “melayani laki-laki”, dan lain-lain. Peneliti juga masih menemukan penggunaan kata-kata yang menggambarkan bagian-bagian tubuh perempuan yang diposisikan sebagai obyek kepuasan laki-laki (fetisisme seksual), yaitu sebanyak 4%. Hal ini tampak dalam penyebutan seperti, “tubuh yang menjadi aset menguntungkan”. Kata-kata tersebut menggambarkan perempuan sebagai obyek kepuasan laki-laki dan perempuan digambarkan sebagai obyek yang dikuasai oleh laki-laki.

Hal ini lah yang perlu diperhatikan oleh Suara Merdeka sebagai surat kabar yang terbesar di Jawa Tengah. Terlebih lagi, 47% pembaca Suara Merdeka adalah perempuan (diambil dari *Company Profile* Suara Merdeka), tentunya dalam setiap penyajian informasi Suara Merdeka dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kepada khalayak. Sebuah media yang sensitif gender tidak akan memberitakan perempuan dengan menggunakan bahasa yang vulgar dan menyudutkan perempuan. Perempuan tidak akan digambarkan sebagai obyek yang dieksploitasi oleh laki-laki. Perempuan tidak akan digambarkan sebagai sosok yang terbelakang, tertindas, dan tidak memiliki otoritas terhadap dirinya.

Oleh karena itu, sebagai artikel dalam rubrik Perempuan yang cenderung untuk memihak pada perempuan, penulis juga harus memperhatikan penggunaan kata-kata yang dipilih. Sehingga antara isi opini dan pemilihan kata yang digunakan dapat saling mendukung dan mengarah untuk pro perempuan.

Dengan demikian, Suara Merdeka sebagai salah satu surat kabar terbesar di Jawa Tengah, memiliki peran yang besar untuk memberikan suatu pola pemikiran

yang baru tentang posisi perempuan di masyarakat. Rubrik Perempuan merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai bentuk perjuangan perempuan. Dan untuk dapat menjadi media perjuangan bagi perempuan, terlebih dulu perlu adanya kepekaan gender yang dibangun sehingga mampu membangun jurnalistik yang sensitif gender. Oleh karena itu, selain menampilkan opini yang pro perempuan, rubrik Perempuan juga perlu lebih sensitif terhadap penggunaan kata-kata, terutama kata-kata yang merupakan bentuk kekerasan dalam bahasa.

B. SARAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori mengenai jurnalisme sensitif gender, dengan lebih melihat pada lima ruang bahasa untuk menentukan apakah rubrik Perempuan dalam Suara Merdeka termasuk sensitif gender atau tidak. Dalam proses penelitian, penulis mengalami kesulitan dalam proses coding. Karena itu, pastikan pengkoder memahami apa yang penulis tanyakan sebelum mengisi *coding sheet*.

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti jurnalisme sensitif gender pada media lain atau media yang sama, diharapkan dapat lebih mendalami berbagai kasus yang sensitif gender. Perlu adanya pemahaman yang lebih tentang konsep gender ketika mencoba untuk menentukan sebuah media itu sensitif gender atau tidak. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjelaskan tentang konsep gender dan sex.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aristiarini, Agnes. 1998. *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga.
- Eriyanto, 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Hanif Suranto. 1998. *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Mahir Menulis: Kiat Jitu Menulis Artikel Opini, Kolom, dan Resensi Buku*. Jakarta: Erlangga
- Lan, May. 2002. *Pers, Negara, dan Perempuan: Refleksi Atas Praktik Jurnalisme Gender pada Masa Orde Baru*. Yogyakarta: Yayasan Adikarya Ikapi dan Ford Foundation
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya

- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers
- Piliang, Yasraf A. 2008. *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*. Solo: Tiga Serangkai.
- Priyono, Adi Eko. 2005. *55 Tahun Mengabdikan untuk Jawa Tengah*. Semarang: Masscom Graphy
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4
- Rahayu. 2006. *Modul Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM.
- Semiun, Yustinus. 2006, *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kanisius
- Setiansah, Mite. 2009. *Politik Media dalam Membingkai Perempuan* dalam Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 6, nomor 2, Desember 2009.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Effendy. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Ashadi dan I Made Suarjana. 1995. *Bagaimana Mengembangkan Artikel Opini Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Soemirat, Betty dan Eddy Yehuda. 2008. *Opini Publik*. Jakarta: Universitas terbuka
- Soesiswo, Mas, Amir Machmud dan Adi Ekopriyono. 2002. *Moderator Masyarakat Jawa Tengah*. Semarang: Redaksi Suara Merdeka.
- Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani. 2007. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: ÇarasvatiBooks.

Titscher, Stefan, dkk. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yusuf, Iwan Awaluddin. 2004. *Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peran dan Konstruksi Sosial Tentang Perempuan*. Vol 7. No. 3 Maret 2004.

SKRIPSI DAN MAKALAH

Anggara, Yustina. 2010. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Harian Kalteng Pos (Analisis Isi Kode Etik Jurnalistik Indonesia pada Berita Kriminal Harian kalteng Pos)*. Yogyakarta: Atma Jaya.

Poety, Theresia Garudisari S. 2010. *Penggunaan Media dan Kepuasan Membaca Surat Kabar Suara Merdeka (Studi Korelai Antara Membaca Surat Kabar Suara Merdeka dengan Kepuasan Membaca Berita-Berita Lokal di Surat Kabar Suara Merdeka di Kalangan Pejabat Pemerintah Grobogan)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Putri, Scolastika Maria Meidiana Christavi Adiari. 2011. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Media (Analisis Isi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Berita Kriminalitas di Surat Kabar Harian Jogja periode Agustus 2009-Agustus 2010)*. Yogyakarta: Atma Jaya.

Piliang, Yasraf A. *Gender Horrography: Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemberitaan Pers*, dalam seminar ‘Jurnalisme Ramah Gender: Perspektif Gender dalam Pemberitaan Pers’, Yayasan Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) dan Aceh Press Club (APC), Banda Aceh, 26 Februari 2002.

WEBSITE

Agustina, Andriani. 2011. *Ibu dalam Lagu*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/11/14618>
[8/Ibu-dalam-Lagu](#). Intenet. akses 18 Januari 2012

Andrianto, Andi. 2011. *Menjadi Guru TKW*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/07/13/15236>
[3/Menjadi-Guru-TKW](#). Intenet. akses 18 Januari 2012

Astuti, Tri M Pudji. 2011. *Rok Mini dan Pemerksaan*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/28/16075>
[2/Rok-Mini-dan-Pemerksaan](#). Intenet. akses 18 Januari 2012

Faizi. 2011. *Belajar dari Kasus Bos IMF*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/15/14965>
[1/Belajar-dari-Kasus-Bos-IMF](#). Intenet. akses 18 Januari 2012

Fauzi, Mohammad. 2011. *Saat Ibu Membacakan Buku*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/18/14681>
[9/Saat-Ibu-Membacakan-Buku](#). Intenet. akses 18 Januari 2012

Furaida, Asni. 2011. *Penokohan Perempuan dalam Komik*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/13/14329>
[7/Penokohan-Perempuan-dalam-Komik](#). Intenet. akses 18 Januari 2012

Hefni, Wildani. 2011. *Perempuan, Jilbab, dan Kebohongan Visual*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/14/16994>

7/Perempuan-Jilbab-dan-Kebohongan-Visual. Intenet. akses 18 Januari 2012

Himawan, Nurul. 2011. *Darsem dan Realitas TKW*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/20/14408>
7/Darsem-dan-Realitas-TKW. Intenet. akses 18 Januari 2012

Kaleka, Norbertus. 2011. *Kaum Ibu dan Pengelolaan Sampah*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/22/15028>
7/Kaum-Ibu-dan-Pengelolaan-Sampah. Intenet. akses 18 Januari 2012

Kaleka, Norbertus. 2011. *Perempuan, Tiang Ekonomi Keluarga*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/07/20/15322>
0/Perempuan-Tiang-Ekonomi-Keluarga. Intenet. akses 18 Januari 2012

Kurniasih, Tri Wahyuni. 2011. *Perempuan dan Korupsi*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/21/16000>
2/Perempuan-dan-Korupsi. Intenet. akses 18 Januari 2012

Muzakki, Khoirul. 2011. *Kontroversi Hukum Nikah Siri*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/28/17154>
2/Kontroversi-Hukum-Nikah-Siri. Intenet. akses 18 Januari 2012

Nuraini, Rahmi. 2011. *Gerakan Perempuan Kini*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/27/14473>
7/Gerakan-Perempuan-Kini. Intenet. akses 18 Januari 2012

Nurcholish. 2011. *Perempuan sebagai Tiang Negara*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/21/17080>
8/Perempuan-sebagai-Tiang-Negara. Intenet. akses 18 Januari 2012

Pilliang, Yasraf A. 2007. *“Gender Horrography”*: Kekerasan Terhadap

Perempuan dalam Pemberitaan Pers.

<http://kippas.wordpress.com/2007/07/18/%e2%80%9cgender-horrography%e2%80%9d-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pemberitaan-pers/>. Internet; akses 20 Desember 2011

Prasetyo, Anton S.Sos I. 2011. *Adakah Khadijah di Masa Kini?*.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/14/159157/Adakah-Khadijah-di-Masa-Kini>. Intenet. akses 18 Januari 2012

Qomariyah, U’m. 2011. *Paradigma Baru Feminisme.*

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/01/148418/Paradigma-Baru-Feminisme>. Intenet. akses 18 Januari 2012

Sulaksono, Gery. 2011. *Dibutuhkan, Laki-Laki yang Feminis.*

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/07/169083/Dibutuhkan-Laki-laki-yang-Feminis>. Intenet. akses 18 Januari 2012

Suryaningsih. 2011. *Lupa Ber-KB, Belajar dari Kasus Wulan.*

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/07/06/151549/Lupa-Ber-KB-Belajar-dari-Kasus-Wulan>. Intenet. akses 18 Januari 2012

Tempo. 2010. *Banyak Media Senang Lecehkan Perempuan.*

<http://www.tempo.co/read/news/2010/11/26/064294705/Banyak-Media-Senang-Lecehkan-Perempuan>. Internet. akses 8 Desember 2011

Ulum, Misbahul. 2011. *Belunggu Politik Perempuan.*

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/08/148999/Belunggu-Politik-Perempuan>. Intenet. akses 18 Januari 2012

SURAT KABAR

Suara Merdeka, 8 Januari 2010. *Kakek 'Kerjai' Siswi Kelas V SD*

Suara Merdeka, 12 Mei 2010. *Feminisme Layar Kaca.*

Suara Merdeka, 12 Januari 2011. *Tragis! Gadis Cacat Mental Dihakili Ayah Tiri.*

Suara Merdeka, 5 Desember 2006. *Yahya Mundur dari Golkar*

Suara Merdeka, 6 Desember 2006. *Yahya Diperas Rp 5 Milyar*





LAMPIRAN

Artikel	OPINI										SENSITIF GENDER									
	Isi opini							Arah opini			Pornografi		Pornokitsch		Fetisisme		Seksisme		Voyeurisme	
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	ADA	TA	AD	TA	AD	TA	AD	TA	AD	TA
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				

Keterangan:

Isi Opini:

1= kritik

2= pujian

3= saran

4= kombinasi kritik dan pujian

5= kombinasi kritik dan saran

6= kombinasi saran dan pujian

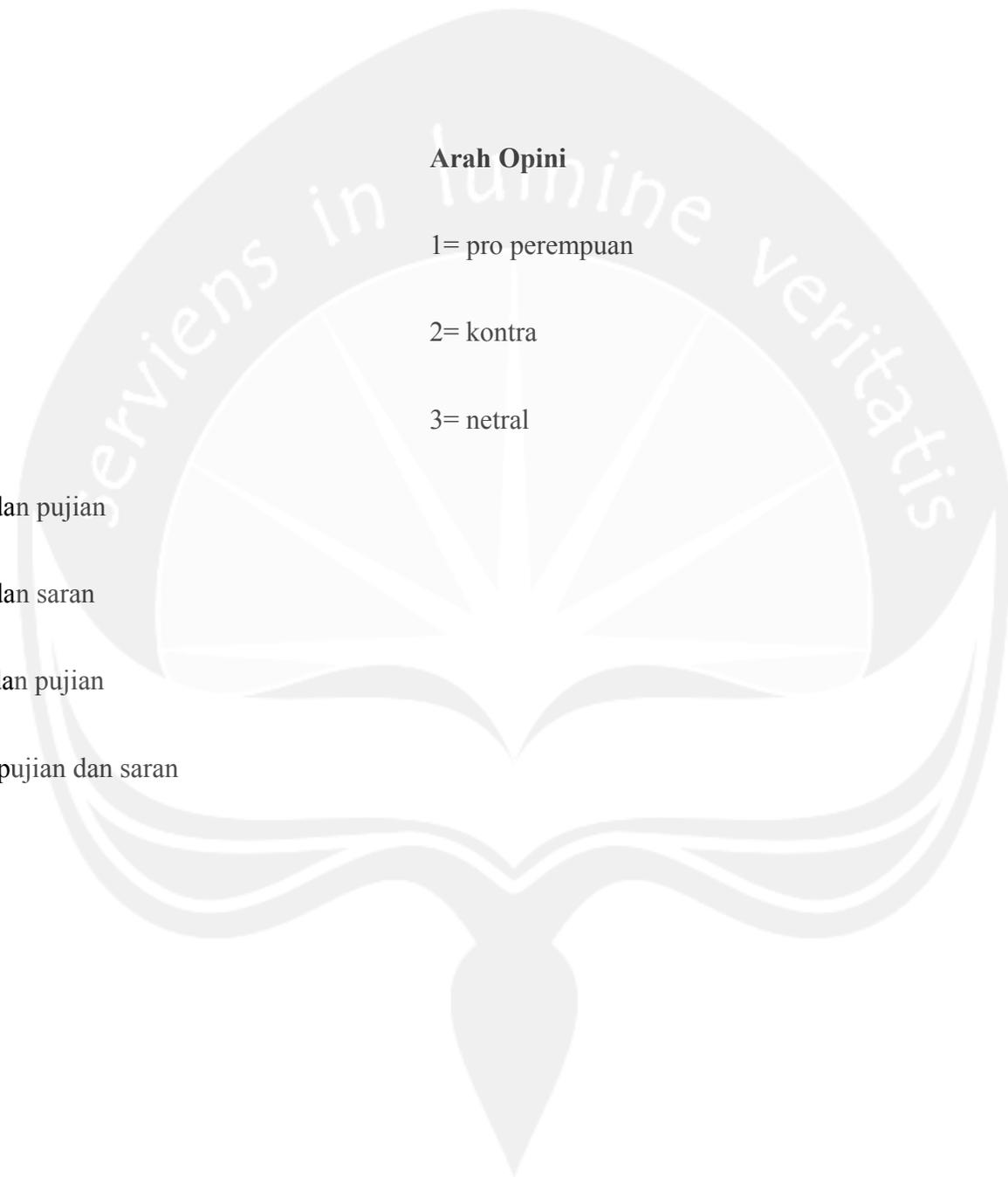
7= kombinasi kritik, pujian dan saran

Arah Opini

1= pro perempuan

2= kontra

3= netral



BERITA 1

05 Januari 2011

WAJAH PEREMPUAN INDONESIA

- Oleh Evarisan

SETIAP 25 November selalu diperingati sebagai Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, sedangkan 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Momentum itu hendaknya tak dimaknai sebatas seremonial, tetapi sebagai bagian dari refleksi seberapa jauh capaian untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan penghentian penyebaran HIV/AIDS.

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang mencatat, selama 12 bulan, November 2009-Oktober 2010, terjadi 620 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Korban 1.106 orang perempuan dengan 55 orang di antaranya meninggal dunia. Tragis, bahwa banyak pelaku kekerasan adalah aparat negara, polisi, TNI, kepala dinas, guru, dan lain-lain.

Angka itu naik jika dibandingkan dengan tahun 2009, yakni 614 kasus; korban 1.091 orang dengan 48 di antaranya meninggal dunia. Fakta yang sama di Indonesia disampaikan Komnas Perempuan, yakni tahun 2008 ada 54.425, meningkat 263% menjadi 143.586 tahun 2009. Tentu saja angka itu bukan angka pasti, karena kasus yang tak dilaporkan jauh lebih besar. Namun, ironis, kasus yang diproses sampai ke pengadilan sangatlah kecil. Itu pun vonis yang dijatuhkan sangat ringan. Celaknya, kelemahan penegakan hukum memperburuk kondisi perempuan.

Itu belum termasuk persoalan yang merundung pekerja migran atau tenaga kerja wanita (TKW) kita. Hampir setiap tahun terjadi kasus penganiayaan, perlakuan seperti budak, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap mereka. Apa yang dialami Sumiyati, TKW asal Nusa Tenggara Barat, menambah panjang daftar ketidakmampuan negara ini melindungi warga negaranya yang bekerja ke luar negeri. Tak sebanding dengan kontribusi mereka dalam mendatangkan devisa, bahkan sekadar perlindungan pun tidak mereka peroleh.

HIV/AIDS

Tak hanya menjadi korban kekerasan berbasis gender, perempuan juga tak terhindar dari ancaman HIV/AIDS, penyakit yang mematikan. Tak terkecuali para pekerja migran atau TKW. Berdasar data Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (www.voanews.com), tahun 2010 hampir 300.000 orang mengidap HIV/AIDS di Indonesia, dengan 75.000 di antaranya adalah perempuan yang tertular dari pasangan mereka.

HIV/AIDS tak sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia perempuan. Tingginya angka perempuan pengidap HIV/AIDS kebanyakan dipicu oleh hubungan seksual pasangan mereka dengan pekerja seks. Itu menunjukkan, ada relasi kuasa yang tak seimbang antara perempuan dan lelaki pasangan mereka. Perempuan tidak punya posisi tawar, tidak punya kemampuan menolak ketika sang pasangan memaksa untuk berhubungan seksual. Dan, tingginya angka perempuan prostitusi adalah akibat kemiskinan akut. Jadi, dalam konteks ini, perempuan adalah korban. Bukan pelaku.

Itu berarti penghormatan terhadap hak perempuan untuk mendapatkan seks yang aman dan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas belum mendapat tempat di negeri ini.

Demikian pula hak mengontrol kesehatan reproduksi serta hak atas pelayanan kesehatan sampai derajat tertinggi, sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, jauh dari terpenuhi.

Target MGD's

Dalam tujuan Millenium Development Goals (MDG's), ada delapan target yang harus dicapai pada tahun 2015. Pertama, menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan. Kedua, memberlakukan pendidikan dasar universal. Ketiga, mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Keempat, menurunkan angka kematian anak. Kelima, memperbaiki kesehatan maternal. Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain. Ketujuh, menjamin kesinambungan lingkungan hidup. Kedelapan, membangun kemitraan global untuk pembangunan. Itu pun terancam gagal, karena tak tampak upaya konkret pemerintah untuk memenuhi target tersebut.

Angka kemiskinan perempuan, kekerasan berbasis gender, kematian ibu, dan penderita HIV/AIDS tetap tinggi. Fakta itu membuktikan diskriminasi terhadap perempuan menghambat penikmatan perempuan atas hak asasi. Perempuan terancam tak dapat menikmati hak hidup, hak berkembang, dan berpartisipasi, serta terhambat mengakses prasarana dan sarana publik, pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan. Juga terhambat akses mereka untuk memperoleh keamanan, keadilan, dan pemulihan diri.

Sistem perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan ketertularan HIV/AIDS buruk. Ketersediaan berbagai peraturan, undang-undang, prasarana dan sarana saja tak cukup.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia harus memastikan diri membuat kebijakan yang dapat mengubah status hak perempuan.

Karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atas dasar apa pun. Kedua, menindak tegas pelaku kekerasan terhadap perempuan, terlebih bila sang pelaku adalah aparat negara. Ketiga, mengevaluasi dampak implementasi program kerja pemerintah terhadap pemajuan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

Keempat, meningkatkan status pemenuhan hak asasi perempuan dengan menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang tepat bagi perempuan sesuai dengan standar hak asasi. Kelima, melibatkan partisipasi perempuan secara penuh dalam penyusunan kebijakan, program, dan anggaran. Keenam, meratifikasi Konvensi 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. (51)

- Evarisan SH MH, Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang (/)

BERITA 2

19 Januari 2011

PEREMPUAN, DUTA LITERASI

- o Oleh Lily Maysari Angraini MS

SEBANYAK 5,3 juta perempuan Indonesia buta aksara. Angka yang paling banyak, jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Tragis! Karena, angka buta aksara perempuan selalu menduduki peringkat teratas. Itu membuktikan, proyek pemberdayaan dan pendidikan untuk perempuan memprihatinkan.

Ada dua masalah yang mengemuka. Pertama, meski kebanyakan perempuan buta aksara sudah berusia lanjut, toh itu tak tetap menjadi bukti konkret betapa selalu perempuan yang menjadi pihak tak berpendidikan. Ironis, karena perjuangan Kartini (1879-1904) dari Jawa Tengah, Rohana Khoeddoes (1884-1972) dari Sumatera, dan Dewi Sartika (1884-1947) dari Jawa Barat sudah lebih dari satu abad menggema. Namun ternyata sampai saat ini masih ada perempuan gagal menjadi manusia berpendidikan. Kedua, perempuan sebagai duta literasi.

Pembentuk Intelektualitas

Masalah pertama merupakan wujud keprihatinan atas nasib perempuan buta aksara. Masalah kedua mencerminkan keprihatinan atas nasib perempuan yang tak mendayagunakan kemampuan membaca untuk menjadi duta literasi bagi anak-anak, bagi generasi berikutnya. Itu “tugas” bagi perempuan setelah bisa membaca.

Perempuan sebagai duta literasi perempuan dimulai pada awal mula kehidupan anak, yaitu saat pembentukan kromosom janin. Dalam banyak penelitian embriologi, anak yang cerdas berasal dari gen ibu yang cerdas. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan hanya dibedakan satu sel kromosom; lelaki memiliki pasangan kromosom XY, sedangkan perempuan memiliki pasangan kromosom XX.

Secara biologis, gen ibu lebih mendominasi dalam pembentukan intelektualitas sang anak, sedangkan gen ayah lebih memberikan kontribusi pada bentuk fisik anak.

Dalam salah satu surat kepada Nyonya Abendanon tentang pendobrakan tradisi yang membelenggu pendidikan bagi perempuan, Kartini menulis, “Dari perempuanlah pertama-tama manusia menerima didikannya, di haribaannyalah anak itu belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata.” Penggalan surat Kartini itu bukan sekadar pesan, melainkan sebetuk peringatan bagi kita. Meski, memang, Kartini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang masalah literasi.

Pemikiran Kartini itu sama dengan pemikiran tokoh pendidikan Maria Montessori (1870-1952) soal pendidikan literasi bagi anak, yang dibahas Ki Hajar Dewantara (1889-1959) dalam tulisan-tulisannya. Perkembangan dan pembentukan budaya literasi anak kebanyakan dari sang ibu. Sebab, ibulah yang paling banyak bersama anak. “Dalam waktu tiga bulan, bayi nyaris bisa belajar menuturkan semua bentuk kata benda, sufiks, prefix, dan kata kerja yang beragam dengan mudah. Dan, pada diri setiap bayi, semua itu berlangsung sempurna pada akhir usia dua tahun kehidupannya,” kata Montessori (2008: 200).

Montessori pun mengingatkan betapa penting lingkungan belajar bayi. “Apabila ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang berpendidikan dengan kosakata yang luas, ia pasti akan mencerap semua dengan sama mudah dan lancarnya.”

Bukan Domestifikasi

Kebersamaan perempuan atau ibu dan anak yang biasanya memakan waktu lama sering digugat oleh kaum feminis sebagai pembatasan peran perempuan di ranah publik, seperti politik, ekonomi, budaya. Ada domestifikasi peran perempuan yang hanya dikhususkan di dapur, kasur, sumur, sebagai the second sex. Kenyataan itu memang banyak benarnya. Namun perjuangan gugatan domestifikasi perempuan harus dibangun dan diperjuangkan dari ranah domestik.

Jika kita sepakat pembentukan dan perkembangan anak sangat penting dan signifikan pada masa pertumbuhan awal, seharusnya perempuan bisa berperan untuk menghapus penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan sejak dini. Jangan sampai perempuan kelak hanya membesarkan para penindas baru yang akan menggagalkan perjuangan perempuan sebelumnya.

Maka, perempuan harus meningkatkan peran sebagai duta literasi. Pelatihan membaca cerita, dongeng, pengenalan dan pendalaman pengaruh media massa, dan sebagainya seharusnya banyak diberikan kepada ibu rumah tangga. Selain itu, perempuan diberdayakan untuk kritis terhadap media, buku cerita atau dongeng, dan sebagainya.

Cerita Cinderella, sebagai contoh, banyak dikritik kaum feminis sebagai cerita yang patriarkis dan sekaligus penindasan perempuan terhadap perempuan. Namun kebanyakan perempuan belum menyikapi secara kritis cerita impor yang banyak dibaca itu. Tentu semua itu tidak mungkin dicapai hanya dengan mengonsumsi susu, yang konon mencerdaskan, seperti dalam berbagai iklan.

Yang lebih penting adalah menjadi ibu pembelajar. Itu tugas semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama yang mengaku feminis yang peduli terhadap perempuan. Di atas ibu dan anak yang cerdas dan antipenindasan-kekerasan, kita mendirikan peradaban. Karena itulah kita harus membantu dan melayani mereka sedemikian rupa, sehingga tak perlu menapaki jalan sendirian. (51)

- Lily Maysari Angraini MS, mahasiswa Fisika Teori Fakultas MIPA UNS Surakarta (I)

BERITA 3

25 Januari 2011

FACEBOOK DAN KEPALSUAN

- Oleh Agunghima

ARISTOTELES, filsuf Yunani kuno, 2.300 tahun lalu sudah menulis bahwa manusia adalah binatang yang rasional. Perbedaan manusia dan hewan adalah kemampuan manusia memakai akal budi untuk mengambil keputusan dan memahami lingkungan sekitar. Maka, ketika tak mau menggunakan akal budi, manusia bisa disamakan dengan hewan. Manusia menjadi seutuhnya karena mampu berpikir selaras dengan akal budi dan nuraninya.

Bagi Aristoteles, hidup yang baik dipimpin akal budi, yakni hidup berkeutamaan dengan pembiasaan. Misalnya, orang jujur terbiasa berkata dan bertindak jujur, orang terampil bermain musik karena terbiasa bermain musik. Jadi hidup berkeutamaan adalah akumulasi pembiasaan dari perbendaharaan sikap, kata, dan tingkah laku yang baik.

Kini, hidup yang beradab dan berkeutamaan adalah dasar peradaban manusia untuk mencapai keluhuran. Tentu itu akan memicu makin terasanya keadilan, kebenaran, dan kedamaian daripada kejahatan dan kepalsuan.

Dasawarsa terakhir ini, kehadiran situs jejaring sosial Facebook menyita perhatian dalam pergaulan masyarakat. Facebook menjadi bagian penting dalam perdebatan sosial, politik, dan budaya. Kemunculan grup semacam “Kasus Century”, “Koin untuk Prita”, “Dukung Luna Maya” adalah bukti Facebook berdampak menghebohkan. Facebook juga bisa menjadi sarana bisnis, usaha, jasa, cari jodoh, informasi orang hilang, dan kepentingan lain.

Namun Facebook pernah difatwakan haram oleh para ulama karena punya efek negatif tak kalah dahsyat. Bahkan beberapa perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah, memblokir situs itu dengan alasan berbeda-beda. Itu cukup menjadi bukti Facebook dianggap penting dan dapat mengganggu kestabilan organisasi.

Kehadiran dan penyebarluasan Facebook di Indonesia terjadi pada rentang waktu singkat, 2004-2010. Bahkan para pengguna di negeri ini terbanyak kedua di dunia. Itu tentu didorong oleh kemudahan dan kemurahan mengakses internet. Dan, kapitalisme modern benar-benar memanfaatkannya untuk meraup keuntungan.

Lihatlah, vendor-vendor telepon seluler, baik lokal maupun internasional, berlomba-lomba menghadirkan fitur Facebook sebagai daya tarik penjualan. Karena kemudahan itu pula, perempuan Indonesia memanfaatkan jejaring sosial tersebut untuk mengembangkan eksistensi. Prediksi Facebook, selama beberapa tahun ke depan, wanita lebih mendominasi penggunaan situs itu.

Bermacam Alasan

Ada bermacam alasan bagi perempuan menggunakan Facebook. Namun dalam survei sebuah lembaga independen (www.socialtimes.com) disebutkan, mereka menggunakan Facebook untuk berbagi foto, video, dan memperbarui status pada berbagai kesempatan.

Perempuan seolah harus melaporkan semua hidup dan perjalanan mereka. Jadi eksistensi diartikan secara dinamis, sehingga ada unsur berbuat dan menjadi, dan perempuan dipandang sebagai realitas yang terbuka, belum selesai, dan berdasar pengalaman konkret.

Pengalaman itulah yang secara tak berkesadaran menempatkan perempuan dalam kekuasaan laki-laki.

Sebagai makhluk konsumtif, diniscayakan perempuan mempunyai perilaku membabi buta hingga dalam menggunakan situs jejaring itu pun terkadang tak sadar efek negatif yang ditimbulkan. Meski Mark Zuckerberg kali pertama membuat situs itu sebagai media komunikasi para mahasiswa Harvard, toh perkembangannya yang mendunia tak menafikan dampak buruk yang muncul.

Data Facebook pun menyatakan pengguna wanita meningkat tajam, bahkan juga dalam penyalahgunaan. Secara tak sadar perempuan terlena dalam dunia keakraban semu dan bayang-bayang fasisme. Dalam bahasan harunyahya.com dan bukunya *Fasisme: Ideologi Berdarah Darwinisme* dikemukakan, itu untuk memperdaya rakyat dan organisasi keagamaan; prinsip

yang bertolak belakang dari landasan yang ditanamkan agama pada manusia. Mirip ideologi Nazi yang bertentangan dengan semua ideologi ketuhanan.

Di ranah terkecil, refleksi itu merupakan cerminan hidup berkeutamaan telah dicerai perempuan yang menyalahgunakan situs jejaring tersebut. Fakta itu makin mencengangkan ketika Daily Telegraph melansir perselingkuhan oleh perempuan sebagai peringkat pertama dalam penyalahgunaan Facebook. Itu berarti anggapan ideologi yang dibawa Facebook berupa antisosialis dan keakraban semu sebagai bagian paham fasis yang mengabaikan kontak psikologis memperoleh pembenaran. Dalam keakraban semu itu, beberapa nilai mengarah ke dehumanisasi yang secara perlahan mengantarkan manusia untuk “berkontak fisik” melalui teknologi.

Secara tak sadar, itu mengondisikan masyarakat sosial yang dulu bertegur sapa, berbahasa lisan, lebih memilih Facebook untuk mengakrabkan diri sehingga berkemungkinan melunturkan budaya sopan santun berbicara.

Kekuatan dehumanisasi Facebook itu, berdasar fakta yang ditunjukkan Daily Telegraph, secara tak langsung merupakan pengingkaran perempuan terhadap derajat kemanusiaan.

“Wanita sekarang lebih banyak terlibat skandal dibandingkan dulu. Berdasar studi terbaru, pria yang terlibat skandal 20%, sedangkan wanita 15%. Namun mereka menunjukkan sikap sangat berbeda ketika berbohong. Peningkatan itu sebagian besar terjadi setelah perempuan memiliki akun Facebook,” ujar Dr David Holmes, psikolog dari Manchester Metropolitan University.

Selingkuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II 1991, selingkuh adalah tidak berterus terang; tidak jujur; suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; curang; serong. Secara tegas psikolog Zainoel B Biran menyatakan selingkuh itu (ketika) orang melakukan suatu tindakan yang tak sesuai dengan komitmen.

Dan, ternyata, peluang perselingkuhan lewat Facebook sangat besar. Tiba-tiba, dalam waktu relatif cepat, jejaring itu menyediakan banyak topeng bagi perempuan. Hasil survei yang diprakarsai Netmoms lebih mencengangkan, yakni 25% istri pernah berselingkuh lewat Facebook, sampai dengan berhubungan intim, sedangkan 64% sebatas selingkuh psikologis, yaitu curhat hingga sex phone.

Data itu mungkin bisa saja tak dipercaya, tetapi jika Anda berselancar dan mencari kasus di dunia nyata yang berkait paut dengan Facebook tentu akan banyak tautan mencengangkan mengenai perempuan yang mencandui kepalsuan. Tentu banyak ragam kepalsuan perempuan, baik dari hal terkecil sampai besar.

Namun tetap harus disadari, ketika melakukan segala hal serbapalsu, hidup berkeutamaan telah lenyap. Bukankah berbohong terus-menerus dan mengingkari komitmen lama-lama bisa dianggap kebenaran? Bukankah ideologi fasis yang terserap dalam propaganda hitam Nazi menyatakan, kebohongan adalah kebenaran yang sedikit diselewengkan?

Betapa Facebook telah membuat begitu banyak kepalsuan terlahirkan oleh perempuan. Jika data

survei di negara-negara Barat yang notabene liberal saja seperti itu, bagaimana dengan Indonesia? Jangan-jangan angka itu terlalu sedikit dan kenyataan sesungguhnya jauh lebih mengguncangkan? (51)

- Agunghima, pegiat Openmind Community Semarang (I)

BERITA 4

02 Februari 2011

ATAS NAMA MORAL, PEREMPUAN DIKRIMINALKAN

- o Oleh Fanny Chotimah

ATAS NAMA, film dokumenter produksi Komnas Perempuan besutan sutradara M Abdul Aziz, mengetengahkan persoalan yang dihadapi perempuan dan kelompok minoritas demi memperoleh kesempatan menikmati hak dasar sebagai warga negara. Persoalan yang dihadapi berakar dari praktik politik yang melahirkan kebijakan daerah yang mengkriminalkan perempuan, membatasi ruang ekspresi diri dengan penyeragaman, serta membiarkan diskriminasi dan kekerasan.

Film itu mengangkat tiga kisah. Kisah pertama berupa pengalaman Lilis yang jadi korban salah tangkap dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran. Saat pulang kerja sebagai pelayan restoran, Lilis terjaring razia. Dalam persidangan tindak pidana keesokan harinya, dia divonis sebagai pelacur dan didenda Rp 300.000. Karena tak mampu membayar, dia dikurung tiga hari.

Kisah kedua pengalaman perempuan Aceh berhadapan dengan kebijakan tentang aturan busana, yakni Qanun Nomor 11 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Kaum perempuan tak bisa keluar rumah berceklana jins. Meski berjilbab, jika dinilai tak memenuhi standar jilbab “halal” tetap dirazia. Pada masa sosialisasi, perempuan yang terjaring razia diberi rok panjang gratis. Rok itu harus dipakai untuk menggantikan celana panjang.

Kisah ketiga pengalaman perempuan dari komunitas Ahmadiyah di Lombok Barat yang mengalami kekerasan dan terusir dari tempat tinggal mereka. Saat ini, mereka tinggal di pengungsian sambil menanggung trauma akibat pengusiran yang tak manusiawi.

Perda Diskriminatif

Tahun 2010, Komnas Perempuan mencatat ada 189 kebijakan diskriminatif; ada kenaikan 35 kebijakan dari tahun sebelumnya. Andy Yentriyani, komisioner Komnas Perempuan, menyatakan (Gatra, 6/1/11) perempuan dan kelompok minoritas dirugikan oleh kebijakan yang menggunakan simbol agama dan alasan moralitas. Kebijakan itu membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu belum termasuk kasus salah tangkap terhadap perempuan.

Peraturan daerah sejenis berlaku pula di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Busana Muslim, yang mewajibkan perempuan dewasa berjilbab. Perempuan yang tak berjilbab tidak bisa mengurus kartu tanda penduduk (KTP). Di Kabupaten

Bantul, DIY, ada Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran. Perda itu diujimateriilkan ke MA, tetapi ditolak karena permohonan pengujian melewati batas waktu yang ditetapkan, yakni 180 hari sejak diterbitkan.

Sementara itu, Perda Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Antiperbuatan Maksiat berjalan mulus. Lingkup perda itu meliputi perbuatan kemaksiatan, seperti pelacuran, pelanggaran kesusilaan, dan minuman beralkohol.

Kebobrokan moral masyarakat merupakan keprihatinan bersama. Agama menawarkan nilai-nilai moral yang mulia, meski sering dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu. Posisi perempuan dalam agama pun masih jadi perdebatan.

Persoalan hak dan kewajiban perempuan menurut ajaran agama lalu diinterpretasikan melalui perspektif baru dan relevansinya dengan situasi saat ini. Mental budaya patriarki masih menjadi mindset para pembuat kebijakan yang mayoritas laki-laki. Karena itu perlu pencerahan cara berpikir kaum laki-laki sebagai mayoritas pembuat kebijakan, sehingga perempuan terbebas dari belenggu budaya patriarki yang merugikan.

Posisi-posisi strategis dalam kekuasaan pun masih sedikit diduduki perempuan. Perempuan tak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Akibatnya, peraturan tak mengakomodasi kepentingan perempuan. Karena itu, perlu partisipasi aktif perempuan di wilayah politik. Perempuan dituntut sadar hukum, memahami hak-hak dan kewajiban mereka sehingga bisa melawan perlakuan yang menindas.

Pembaruan dari segi birokrasi pun perlu dilakukan. Sebab alih-alih mempermudah, birokrasi justru acap memperumit urusan. Jika benar Mahkamah Agung sebagai court of justice dan Mahkamah Konstitusi sebagai court of law, maka MA mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan dan MK mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Demi keadilan bersama, seharusnya MK bisa merevisi perda yang disahkan MA.

Produk intervensi hukum pun harus bisa dipertanyakan kembali, bukan menjadi produk mutlak yang tak bisa diganggu gugat. Pemberlakuan perda baru harus terus disosialisasikan. Batas waktu 180 hari harus ditilik kembali, karena apakah dalam pelaksanaan perda baru tersosialisasikan pada bulan keenam sehingga segala keberatan tak mendapat ruang dan waktu. Raperda harus disosialisasikan sebelum disahkan menjadi perda. Jadi respons masyarakat bisa diukur dan dijadikan bahan pertimbangan. Tak tertutup kemungkinan ditemukan solusi terbaik yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Kepentingan Politik

Persoalan moral di masyarakat selama ini mengobjekkan perempuan. Perempuan dianggap biang keladi, sumber godaan, sehingga harus menutup diri agar moral masyarakat (laki-laki) terjaga. Perempuan dikondisikan mengalah jadi korban. Perda mengenai prostitusi dan pemberlakuan razia hanya pada PSK (perempuan), sedangkan pria hidung belang bisa berkeliaran seenak hati dan bebas pulang ke rumah.

Jelas perda semacam itu tak berimbang. Bukankah bisnis prostitusi sejalan dengan hukum

ekonomi ada karena permintaan tinggi? Prostitusi tumbuh subur karena ada pelanggan setia. Jika dibandingkan dengan AS dan Inggris, dalam masalah prostitusi ada perlakuan sama terhadap PSK dan pelanggan; keduanya tak bisa lolos dari jeratan hukum.

Lalu, bagaimana dengan kasus salah tangkap? Adakah pasal dalam perda yang memuat pengaturan mengenai pemulihan nama baik atau malah korban salah tangkap bisa balik menuntut pengadilan dan negara? Tragis jika kita semua harus berakhir seperti Lilis yang menanggung stigma pelacur dan depresi berat hingga akhir hidupnya. Bukankah semua orang sama di mata hukum? Bukankah setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang dijamin Undang-un-dang Dasar 45? Itulah hak memeluk keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk perlindungan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Chandra Kirana menyatakan, demokrasi mati saat orang tak lagi bersuara, saat yang tertindas hanya diam. Perubahan paling nyata bisa dimulai dari diri sendiri. Maka bersuaralah demi hati nurani, demi peradaban yang lebih baik, demi menjadi manusia yang bermartabat. (51)

- Fanny Chotimah, redaksi buletin sastra Pawon dan pegiat Bale Sastra Kecapi Solo (/)

BERITA 5

16 Februari 2011

PEREMPUAN DI KANCAH REVOLUSI

- Oleh Sri Rominah

MESIR bergolak. Jutaan rakyat negeri itu melakukan Revolusi Nil untuk menumbangkan kepemimpinan Hosni Mubarak, penguasa yang dianggap telah memicu kemiskinan dan menerapkan totalitarianisme. Jutaan orang bersuara, turun ke jalan, demonstrasi sehari-hari.

Lapangan Tahrir (Kebebasan) jadi pusat revolusi. Dunia menyaksikan keberlangsungan revolusi itu dengan prihatin karena terjadi aksi kekerasan yang menyebabkan kematian demonstran. Itulah revolusi abad ke-21 yang mewarnai perubahan dunia secara global.

Kita, di sini, menyimak keberlangsungan revolusi itu dari televisi, koran, internet, dan radio. Di kancah revolusi itu muncullah sosok perempuan yang sering membuat penguasa marah karena bahasa dan ceritanya. Dialah Nawal el Saadawi.

Perempuan tua itu bergabung bersama rakyat, menyuarakan kepentingan perbaikan di Mesir, yakni demokratisasi. Pengarang terkenal itulah yang sebenarnya telah memberikan arti pada revolusi, yang selama ini lebih berkesan maskulin.

Mengobarkan Kesadaran

Hampir setiap hari Nawal el Saadawi datang ke Lapangan Tahrir, berbaur dengan rakyat Mesir, serta mengobarkan kesadaran tentang hak-hak rakyat, antitotalitarianisme, revolusi, dan demokrasi. Di layar televisi, kita bisa melihat tubuhnya yang tampak lemah. Namun semangat untuk menciptakan masa depan Mesir yang cerah selalu terlihat dari raut wajah dan perkataannya. Di koran dan majalah, Nawal el Saadawi juga rajin mengeluarkan komentar untuk

didengar warga dunia.

Revolusi ternyata juga milik perempuan, revolusi diartikan oleh perempuan, yang tercermin dari peran Nawal el Saadawi. Pada revolusi itulah Nawal el Saadawi merenungkan kembali perjuangan kata-kata yang telah dia lakukan selama ini untuk menentang rezim diktator, patriarki, diskriminasi, dan marginalisasi perempuan. Karya sastra selama puluhan tahun dijadikan sebagai alat perjuangan dan pembebasan, meskipun si pengarang harus mengalami tekanan, pencekalan, ancaman, dan dipenjara pemerintah dan pihak-pihak tertentu. Nawal el Saadawi tak pernah mundur untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Kita dapat merasakan semangat revolusionernya melalui cerpen, memoar, dan novel karyanya. Beberapa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain Perempuan di Titik Nol, Matinya Seorang Mantan Menteri, Jatuhnya sang Imam, Catatan dari Penjara Perempuan, Tak Ada Kebahagiaan untuknya, dan Memoir Seorang Dokter Perempuan. Usahnya dengan menulis banyak karya sastra dalam pengertian politis dan feminis sesungguhnya telah memengaruhi tahapan-tahapan Revolusi Nil yang saat ini berlangsung di Mesir.

Melalui karya sastra, Nawal el Saadawi membuktikan perannya dalam usaha menjadikan Mesir memiliki masa depan lebih cerah. Kebebasan yang didambakan, pemerintahan demokratis yang diimpikan, kesejahteraan yang diangankan selalu dia perjuangkan lewat kata-kata. Intinya, perempuan tetap memiliki peran penting dalam setiap usaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Karya sastra juga berpengaruh besar untuk menyadarkan rakyat dan mendorong kemunculan gagasan perubahan.

Mengekspresikan Diri

Nawal el Saadawi meyakini, “Setidaknya dalam novelku, aku mempunyai sedikit kebebasan dan kekuasaan.” Artinya, kondisi riil yang memasung hak-hak rakyat, membisukan dan mendiskriminasi kaum perempuan, serta totalitarianisme dapat dilawan dengan fiksi. Perempuan dalam karya sastra mengekspresikan diri yang mencerminkan realitasnya. Perempuan menemukan kebebasan untuk bereaksi dan menyorongkan gagasan perubahan dalam politik, feminisme, ekonomi, pendidikan. Karya sastra adalah wadah dan medium yang mungkin menunjukkan heroisme perempuan di kancah demokratisasi dan revolusi.

Pada usia tua, popularitasnya sebagai pembangkang pemerintah dan pengkritik patriarki, membuat Nawal el Saadawi lantang menyebut pemerintahan Hosni Mubarak adalah tiruan dari Firaun. Pernyataan itulah yang didengar dunia. Pernyataan yang menunjukkan keyakinan politik dan peran pentingnya dalam mengartikan revolusi.

Perempuan di kancah revolusi bukan hanya bagian dari massa yang membisu, melainkan sosok yang menentukan semangat perubahan. Suara Nawal el Saadawi dalam arti luas adalah cerminan dari kehendak rakyat yang selama puluhan tahun terbungkam.

Kita dapat belajar dari sosok Nawal el Saadawi dan peran yang dia jalani selama ini dengan harapan: tercipta Mesir yang demokratis. Perjuangan atas nama feminisme, politik, seni, dan kebudayaan menuntut keberanian dan komitmen.

Nawal el Saadawi adalah contoh yang dapat jadi model gerakan perempuan di berbagai negeri

dalam hal penulisan karya sastra, gerakan feiminisme, revolusi, serta demokratisasi. Peran perempuan harus dinyatakan dengan kesadaran utuh yang menempatkan perempuan sebagai penentu. Gambaran tentang revolusi yang maskulin perlahan-lahan pudar dengan penampilan Nawal el Saadawi di kancah revolusi di Mesir. (51)

- Sri Rominah, guru SMP Negeri 3 Colomadu, Karanganyar

BERITA 6

02 Maret 2011

BAHASA ALTERNATIF PEREMPUAN

o Oleh Rahmi Nuraini

KETERWAKILAN perempuan di lembaga legislatif periode 2009-2014 Jawa Tengah meningkat 6%, dari 15 orang menjadi 21 orang. Peningkatan itu antara lain disebabkan oleh peraturan suara terbanyak Pemilu 2009.

Namun tak banyak yang tahu seberapa jauh peningkatan representasi perempuan legislator itu berkorelasi dengan kontribusi perempuan di dunia legislatif, khususnya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, kiprah perempuan di pentas politik selalu diidentikkan dengan komisi yang menaungi bidang pemberdayaan perempuan (Komisi E). Peran perempuan juga distereotipekan hanya berkenaan dengan kepentingan perempuan. Pelabelan itu secara tak langsung membuat perempuan tak bebas mengekspresikan diri di dunia politik.

Padahal, keragaman peran perempuan telah terjadi di DPRD Jawa Tengah. Itu terlihat dari pembagian perempuan di semua komisi, dari Komisi A, B, C, D, dan E. Perempuan juga diberi kesempatan tampil menjadi pemimpin. Di Jawa Tengah, tiga perempuan dipercaya menjadi ketua fraksi (PDIP, Demokrat, dan Golkar) serta ketua komisi (Komisi C). Dalam berbagai forum kedewanan pun perempuan tampil menjadi pemimpin. Kenyataan itu mematahkan anggapan perempuan hanya berada di komisi yang menaungi pemberdayaan perempuan atau belum mampu jadi pemimpin.

Saat ini, perempuan legislator telah mampu secara aktif terlibat dalam proses politik, dari pembuatan hingga pelaksanaan keputusan politik. Perjuangan kepentingan perempuan telah dipahami dalam perspektif gender, baik secara kognitif, afeksi, maupun behavioral.

Kekuatan perempuan di legislatif juga menonjol, dengan kepribadian yang mempunyai perhatian mendalam terhadap tugas, lebih luwes masuk ke forum perempuan, lebih rajin, lebih aktif, lebih taat peraturan, mempunyai tubuh yang jadi aset menguntungkan serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Opresi Laki-Laki

Meski secara normatif kehadiran perempuan di dunia politik sudah dianggap setara dan perempuan telah membuktikan kelebihan mereka dibandingkan dengan laki-laki, tetap saja peraturan dan standar dalam dunia politik dibuat laki-laki. Hanya sedikit peraturan yang berdasar kebutuhan perempuan. Kehidupan di partai politik juga banyak mengambil model menang dan kalah, kompetisi dan konfrontasi, bukan ide saling menghormati atau kesepakatan seperti

pengalaman perempuan.

Sebagai kelompok subordinat, menurut muted group theory, perempuan tak dapat secara bebas seperti pria dalam mengemukakan keinginan mereka. Sebab, kata-kata diformulasi dan diterjemahkan oleh gaya dominan laki-laki. Perempuan dibisukan; apa yang mereka sampaikan tak diindahkan. Itu secara terus-menerus terjadi, sehingga menyebabkan perempuan tidak berbicara atau bahkan tidak berpikir. Dalam konstruksi patriarkis itulah, laki-laki masih berupaya memberikan opresi terhadap perempuan, yaitu melalui bahasa politik laki-laki yang cenderung meremehkan perempuan.

Opresi terjadi melalui pernyataan ideologi politik laki-laki, baik secara verbal dan nonverbal, yang menegaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Secara verbal terjadi melalui penegasan ideologi psikologis, ideologi tubuh perempuan, ideologi kemampuan, ideologi normalisasi ruang privat/publik, dan ideologi perjuangan perempuan.

Penegasan ideologi-ideologi itu antara lain muncul melalui stereotipe: perempuan lebih berpolitik dengan hati, kurang mampu melakukan sosialisasi cepat, kurang percaya diri, kurang cepat mengambil keputusan, identik dengan urusan privat, menarik dibicarakan (tubuh perempuan), dan hanya memperjuangkan kepentingan perempuan.

Konstruksi itu menyebabkan perempuan tidak bebas mengembangkan bahasa perempuan yang berbeda dari stereotipe perempuan yang feminin. Perempuan harus mempertahankan sifat-sifat keperempuanan untuk diterima masyarakat, meski hanya ditempatkan di kelas kedua, setelah sifat-sifat laki-laki. Hal itu menyebabkan perempuan mau tak mau harus mengembangkan bahasa alternatif yang bisa diterima laki-laki secara sejajar dengan tetap mempertahankan sifat feminin.

Bahasa Alternatif

Bahasa perempuan, menurut pendapat Santoso (2009: 26), selalu merepresentasikan model pandangan hidup tertentu, yakni gambaran konstruksi dunia yang utuh tentang ide hidup dan kehidupan yang telah ditafsirkan dan diolah perempuan.

Melalui bahasa, perempuan melakukan pertarungan sosial untuk mencapai “kesetaraan” dan “keadilan” dalam komunikasi gender.

Dalam setiap perilaku politik mereka, perempuan legislator selalu berusaha membuktikan kesetaraan dalam bidang politik bahwa perempuan yang tampil di politik adalah perempuan mandiri, tidak cengeng, mampu bersaing dengan laki-laki, dan mampu menyelesaikan tugas kedewanan.

Namun tetap menampilkan kepribadian yang sopan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku.

Perempuan kemudian menggunakan bahasa alternatif, yang mengabungkan model bahasa maskulin dan feminin. Penggunaan bahasa alternatif perempuan dilakukan sebagai jawaban atas pengembangan bahasa yang lebih dapat diterima laki-laki dengan mempertahankan karakter khas perempuan.

Model maskulin secara verbal diterjemahkan perempuan legislator dengan mengadopsi nilai-nilai bahasa maskulin, seperti intonasi tegas, humor dan bahasa yang berkonotasi seksual.

Adapun model feminin diadopsi dengan memberikan label positif pada sifat feminin yang dianggap negatif melalui bahasa yang berempati, lembut, dan sopan.

Penggunaan bahasa alternatif juga terlihat secara nonverbal melalui gaya berpakaian dan penampilan perempuan yang mempertahankan sifat feminin melalui penggunaan dandanan dan model pakaian perempuan. Namun dalam pemilihan warna, perempuan berani memadukan warna maskulin seperti abu-abu, hitam, biru, merah, dan coklat dengan warna feminin seperti merah muda, ungu, dan putih.

Jadi penggunaan bahasa alternatif mampu jadi jawaban atas kegelisahan perempuan yang ingin berkarya di ranah politik. Banyak perempuan mampu mengembangkan strategi politik sebagai upaya untuk diterima secara sejajar dengan laki-laki harus diapresiasi. Karena untuk mencapai tahapan itu, perempuan legislator harus bertarung dengan dunia yang didominasi laki-laki. (51)

- Rahmi Nuraini, alumnus Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang, menulis skripsi “Perilaku Politik Legislator Perempuan dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan” (/)

BERITA 7

02 Maret 2011

KESETIAAN DAN HARGA PEREMPUAN

- Oleh A Rifqi Hidayat

WANITA dalam kehidupan sosial acap diposisikan di bawah dominasi laki-laki. Itu terus berlanjut, sehingga menjadi habituasi yang membudaya. Bisa jadi faktor sejarah yang membuat wanita selalu termarginalkan. Sebab, adalah konsekuensi logis sesuatu yang selalu disandarkan (menggantungkan diri) lambat laun jadi tergantung. Sejarah mungkin berbeda andai Hawa yang berhasil membujuk Adam dapat meneruskan dominasi dalam memengaruhi Adam.

Wanita pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara tak lebih dari alat untuk menunjukkan supremasi raja. Dalam salah satu primbon Jawa ada istilah njajah desa milang kori (menjelajahi daerah kekuasaan atau negeri taklukan untuk berburu binatang dan atau mencari wanita cantik untuk dijadikan selir).

Ya, kebiasaan raja Jawa memiliki seorang permaisuri dengan banyak selir. Raja semacam itu dianggap memiliki karisma dan kekuasaan dengan otoritas yang tak dapat diganggu gugat. Layaknya Raja Pada masa modern, ketenaran dan popularitas artis bisa jadi sarana termudah mendapatkan wanita.

Kegemilangan lelaki yang jadi presenter, bintang film, bintang sinetron, dan musikus selalu dikaitkan dengan isu kedekatan dengan para wanita cantik.

Menarik diamati kasus Ariel (vokalis Peterpan). Ketenaran dan popularitas membuat dia layaknya raja yang melebarkan kekuasaan dalam njajah desa milang kori. Tak sedikit artis cantik dan beken dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan dia.

Bahkan saat media gencar memburu berita soal kehamilan seorang wanita penggemarnya, itu menjadi simbol kekuasaan “kerajaan cintanya” dan tak membuat karismanya menyurut di mata wanita, setidaknya bagi Luna Maya.

Setelah bertanggung jawab dengan menikahi si penggemar, kasus itu meredup. Namun beberapa saat kasus itu berlanjut dengan perceraian dan kemunculan video hubungan intim Ariel yang melibatkan sederet artis cantik dan ternama.

Lihatlah, betapa di tengah keruntuhan kontrol sosial, seorang wanita mampu menunjukkan kesetiaan bagai lilin kecil yang memberi terang, sementara dirinya sendiri terus meleleh. Dukungan penggemar juga muncul mengiringi persidangan, sehingga seolah makin mengukuhkan: dia benar-benar raja yang dicintai rakyat.

Keruntuhan Moral Mungkin sebagian orang berpikir, tindakan Ariel adalah cermin keruntuhan moral anak bangsa. Namun dari sudut pandang sejarah kerajaan, di bawah alam sadar, masyarakat masih mengikuti pola lama: raja memiliki otoritas penuh. Kekuasaan dan keperkasaan raja seolah terukur dan dilambangkan dengan kehebatannya membuat para wanita takluk.

Kisah asmara Luna Maya mengingatkan pada kisah Ratu Kalinyamat. Dalam Babad Tanah Jawi dikisahkan, Ratu Kalinyamat menuntut balas pada Arya Penangsang sehingga rela melakukan apa pun, termasuk tapa wuda (bertapa tanpa busana).

Bahkan saat tapa wuda, dia bisa membangun jaringan dengan beberapa petinggi kerajaan yang loyal.

Bermula dari itulah kekuatan Kalinyamat yang saat itu dikuasai Jipang Panolan bangkit, sampai akhirnya keinginan menuntut balas pada Arya Penangsang terwujud.

Dari kedua kisah itu dapat dipahami, sekecil apa pun peluang seorang wanita bisa berubah jadi sangat besar dan berarti jika dia mampu memosisikan diri untuk mengambil peran dalam kehidupan laki-laki. (51)

BERITA 8

13 April 2011

PENOKOHAN PEREMPUAN DALAM KOMIK

- Oleh Asni Furaida

DUNIA buku menawarkan alternatif media yang bisa diakses secara mudah untuk memuaskan minat baca kita. Bentuk buku yang bisa diakses sangat beragam, dari fiksi dan nonfiksi, koran, majalah, jurnal, sampai komik. Media yang paling menarik dan banyak diakses generasi muda sekarang adalah komik.

Komik sangat diminati karena menyatukan dunia tulisan dan gambar. Jika membaca buku, pembaca bebas berimajinasi. Maka saat membaca komik, tak perlu lagi berimajinasi secara visual karena sudah dihadirkan sedemikian rupa oleh komikus. Karena itulah komik sangat digemari semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa.

Komik yang beredar di Indonesia terbagi jadi dua, yakni komik Timur dan Barat. Komik Timur dihasilkan dari Indonesia, Jepang, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Komik Barat dihasilkan oleh

negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat (AS).

Dunia perkomikan, yang saya kenal sejak kelas I SMP, adalah dunia yang berwarna-warni, bentuk imajinasi manusia tanpa batas. Komik menawarkan beragam imajinasi yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya.

Contoh ragam komik yang menjadi budaya massa di masyarakat sekarang adalah komik keluaran Jepang (manga) dan komik AS terbitan Marvel Comic. Manga dan komik AS menyajikan beragam cerita, dari aksi, drama romantik, detektif, petualangan, sampai superhero.

Dibuat Sempurna Bagian komik yang sangat menarik adalah penokohan yang ditunjang jalinan cerita yang bagus. Penokohan dalam manga dan komik AS kebanyakan menghadirkan imaji tokoh perempuan. Imaji tokoh perempuan dibuat sangat berbeda dari dunia nyata. Imaji perempuan dibuat sedemikian sempurna, sehingga terkadang ketika kita ingin mencontoh harus diet ketat, olahraga teratur, bahkan operasi plastik.

Tokoh perempuan dalam komik jadi isu penting untuk dikaji ketika disinggung oleh teori feminis yang semarak dewasa ini. Tokoh perempuan dalam komik selalu digambarkan jadi tokoh pendamping (sidekick) atau bumbu penyedap yang memeriahkan dan menghidupkan suasana komik.

Contoh nyata bisa kita lihat dalam komik terkenal Spiderman. Dalam komik itu diceritakan Spiderman mencintai Mary Jane sejak dulu karena rumah mereka bersebelahan. Namun Spiderman tak sanggup menyatakan cinta karena merasa lemah dan tak layak bagi Mary Jane. Dalam komik Spiderman, tokoh wanita hanya pemanis, bumbu penyedap, sehingga jadi magnet utama agar pembaca setia dan rutin mengikuti.

Kasus paradoks tokoh perempuan dalam komik banyak ditemukan dalam genre komik pahlawan super keluaran AS. Namun fungsi mereka meragukan sejak awal. Bradford Right menyebutkan, "Fungsi utama kehadiran wanita-wanita (di buku komik dahulu) adalah menolak perasaan cinta dari alter ego pahlawan super, mendambakan sang pahlawan super, berusaha agar dekat, mengacaukan segalanya, ditangkap penjahat dan menunggu diselamatkan pahlawan super." Fantasi Pria Fungsi dan peran tokoh perempuan dalam komik sudah dimarginalkan sejak awal hingga akhir cerita. Namun muncullah Wonder Woman, karakter tokoh perempuan yang mengubah semua itu. Wonder Woman diciptakan seorang psikoterapis (ahli kejiwaan) yang peduli terhadap marginalisasi gadis-gadis muda dari komik yang sangat populer.

Wonder Woman menggabungkan kekuatan dan keterampilan, tenaga dan senjata untuk melengkapi kekuatan yang mendominasi. Setelah itu berturut-turut muncul banyak pahlawan super lain, seperti Cat Woman, The Wasp, Elektra, Invisible Girl. Paling tidak komik AS keluaran Marvel Comic selalu menyertakan wanita pahlawan super sebagai pelengkap.

Wanita dalam komik banyak sekali digambarkan menyerupai fantasi lelaki. Mereka selalu berkostum ketat, dengan tubuh tinggi semampai, dada berisi, wajah cantik, bokong seksi, dan penggambaran sempurna lain. Walau kenyataannya jika membayangkan adegan perkelahiran wanita pahlawan super berkostum ketat itu mustahil menang. Sebab, susah berkelahi dengan kostum ketat menempel di kulit.

Namun penggambaran seperti itulah yang dipertahankan para komikus. Strategi penggambaran seperti itu terbukti disukai pembaca yang sukarela mengesampingkan kesangsian bahwa serangan dan pertahanan terbaik adalah selapis tipis kain spandeks.

Sungguh memprihatinkan, ternyata tokoh perempuan dalam komik meski sudah berjuang sedemikian rupa tetap mendapat porsi superfisial. Karena itu, penggambaran tokoh perempuan perlu mendapat insentif dukungan lebih. Apakah kita rela imaji keperempuanan yang semestinya bisa kita ciptakan lebih baik, dirampok habis-habisan oleh para komikus yang berkarya berdasar fantasi liar mereka, yang juga lelaki? Semoga tidak. (51)

- Asni Furaida, bergiat di Bale Sastra Kecapi dan Pengajian Senin Solo

BERITA 9

27 April 2011

GERAKAN PEREMPUAN KINI

- o Oleh Rahmi Nuraini

SALAH satu peran gerakan perempuan terlihat dalam pernyataan sikap bersama soal kasus Arifinto, anggota DPR dari PKS yang tertangkap kamera sedang menonton video porno saat sidang parlemen. Itu terlihat dalam pernyataan pada konferensi pers Jurnal Perempuan di Jakarta (14/4), bersama para aktivis dan perempuan akademisi. Mereka menyambut baik pengunduran diri anggota DPR tersebut.

Muncul juga tuntutan agar Arifinto diperkarakan secara hukum karena melanggar Pasal 5 dan 6 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disebutkan, (Pasal 5) setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi dan (Pasal 6) setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi. Itu berarti, peraturan seharusnya tak diterapkan secara tebang pilih. Terlebih personel yang terlibat merupakan bagian dari pencetus kelahiran peraturan itu.

Pernyataan sikap yang sama disampaikan Aliansi Sumut Bersatu. Mereka mendesak aparat penegak hukum menahan Arifinto. Bahkan mendesak pencabutan UU Nomor 44 Tahun 2008 bila tak digunakan terhadap setiap warga negara tanpa pengecualian.

Peran lain yang dimainkan gerakan perempuan adalah menyuarakan keadilan bagi perempuan. Mereka menyoal kasus diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual, hingga perdagangan perempuan.

Perjuangan Perempuan

Faktanya, sampai tahun 2004, dari sekitar tiga juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang di luar negeri, 70% adalah perempuan dan 95% bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dari tahun ke tahun jumlah TKW-PRT dirundung terus meningkat.

Perempuan buruh migran perempuan sangat rentan tindak kekerasan berbasis gender. Mereka dipaksa bekerja tanpa jam kerja jelas, mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, serta pemerkosaan dan siksaan yang mengakibatkan kematian.

Ironisnya, hanya beberapa perempuan yang memahami perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Hanya beberapa yang sadar bahwa pembagian secara ekonomi dan sosial merupakan konstruksi sosial. Sadar atau tidak sadar, selama ini perempuan hidup dalam lingkungan agama, keluarga, dan masyarakat yang tak peka gender. Akhirnya, perempuan dididik dan berkembang dalam lingkungan yang seolah-olah tampak alami, termasuk dalam melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Perjuangan kaum feminis untuk mengubah keadaan antara lain didasari prinsip dasar bahwa perempuan harus jadi penentu apa yang baik bagi diri mereka dan bersama-sama perempuan lain untuk sampai ke kesadaran kolektif, yakni apa dan siapa sesungguhnya perempuan itu. Feminisme bertujuan mengubah dan membongkar sampai ke akar dunia laki-laki, ketidakadilan yang menentukan apa yang dianggap benar untuk kaum perempuan.

Membicarakan gerakan perempuan Indonesia, sebetulnya sama dengan menggagas gerakan yang mempunyai sejarah panjang. Sejak sebelum kemerdekaan, perempuan Indonesia telah berorganisasi dan beraksi. Kartini memulai perlawanan dengan menolak diskriminasi terhadap perempuan dalam nilai-nilai masyarakat yang feodal dan tradisional. Kemudian mengembangkan visi perempuan baru yang jadi pendidik sosial dan pengasuh generasi baru yang tercerahkan.

Selain Kartini, kita mengenal perempuan-perempuan tangguh yang menyuarakan tatanan sosial yang ideal bagi perempuan. Sebut saja Maria Walanda Maramis, Cut Nyak Dien, Inggit Ganarsih, Rasuna Said, Khofifah Indar Parawansa, Saparinah Sadli, Musdah Mulia, Ratna Sarumpaet.

Terhitung sejak zaman Kartini hingga sekarang, tokoh-tokoh dan perempuan pejuang bergantian peran. Mereka mengusung suara yang sama tentang perwujudan tatanan sosial yang adil bagi perempuan. Perwakilan perempuan kini dapat ditemui di ruang-ruang politik, seperti partai politik dan lembaga legislatif.

Memang banyaknya gerakan perempuan yang memperjuangkan kepentingan perempuan tak secara langsung menjamin suara perempuan didengar. Namun setidaknya makin banyak orang bersuara, efek yang ditimbulkan akan kian besar. Sama dengan penjabaran teori bola salju yang menggambarkan betapa dahsyat efek bola salju yang makin jauh menggelinding kian besar pula besar.

Perjuangan tetap harus dimulai sejak dini dan dari hal yang paling mungkin dilakukan. Jika lebih banyak perempuan sadar akan kegenderan, tentu lebih berani menentukan sikap atas isu gender.

Tantangan Gerakan

Iklim yang kondusif bagi tumbuh subur gerakan perempuan tak selalu meminimalisasi persaingan di ruang internal. Diakui kaum laki-laki, perselisihan secara frontal justru terjadi antarperempuan. Bukan lagi antara laki-laki dan perempuan. Tak jarang mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian dari lelaki — konsep yang sepertinya kembali lagi ke stereotype perempuan sebagai makhluk kedua.

Eksistensi perempuan seakan-akan disahkan oleh laki-laki. Seperti subjektivitas atas kecantikan dan kepandaian perempuan yang berada di tangan laki-laki.

Kesadaran semacam itulah yang seharusnya dijadikan dasar bagi perempuan untuk bertindak. Dalam lingkungan dinamis, perempuan harus mampu secara cerdas menangkap peluang. Tentu agar mampu mencari posisi ideal yang dapat memaksimalkan potensi diri, tanpa harus berkonfrontasi dengan serangan berbasis gender.

Pada tataran ini, tak perlu lagi mengotak-ngotakkan perempuan seperti aliran feminis yang berkembang. Karena, landasan dari organisasi perempuan adalah sikap saling menghormati perbedaan, terutama di kalangan perempuan. Jika seorang perempuan merasa berguna karena total mengabdikan diri pada keluarga, sesungguhnya dia telah sadar gender.

Sama seperti jika perempuan puas dengan beraktualisasi dalam pekerjaan. Sesungguhnya perempuan itu juga sudah berperspektif gender. Sebab, subordinasi laki-laki sesungguhnya bekerja di luar kesadaran perempuan. Jika perempuan secara sadar, tanpa paksaan, merasa tak terdiskriminasi, perempuan itu telah mencapai kebebasan.

Jika tantangan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan (ekonomi, kesehatan, dan pendidikan) sudah terpenuhi, sudah saatnya para perempuan beranjak untuk memenuhi kebutuhan lebih besar: aktualisasi diri. Sebab, secara normatif, hak-hak perempuan memang sudah terjamin. (51)

- Rahmi Nuraini, alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip, kini Humas YSAGE Indonesia (/)

BERITA 10

11 Mei 2011

IBU DALAM LAGU

- Oleh Andriani Agustina

SETIAP orang pasti memiliki kenangan personal dengan orang tuanya, terutama ibu. Namun pada zaman modern yang makin individualis ini, arti kasih cinta ibu sepanjang jalan mulai bias. Berbagai hal dapat menjelma jadi medium dalam merefleksi kasih ibu, termasuk musik.

Selama ini, lagu “Kasih Ibu”, “Ibu” (Iwan Fals), “Bunda” (Melly Goeslaw), “Satu Rindu” (Opick) menjadi contoh lagu-lagu yang jadi momentum dalam memaknai peran dan eksistensi ibu (dan kaum perempuan) dalam rutinitas perayaan setahun sekali: Hari Ibu.

Lagu anak-anak “Kasih Ibu” mungkin termasuk lagu kenangan sepanjang masa. Kita sering menyanyikan lagu itu sejak kecil sampai jadi orang tua. Lagu sederhana, tetapi berkesan mendalam. Lagu itu mengajak kita merenungkan siapa sosok ibu dalam kehidupan manusia.

Anak-anak sering menyanyikan dengan tulus dan ekspresi jujur. Lagu itu menjadi sarana pengajaran dan pendidikan yang efektif pada anak-anak untuk menghormati ibu. Lagu “Ibu” (Iwan Fals) masih populer sampai sekarang. Sebab, menjelang peringatan Hari Ibu sering diputar di radio atau jadi lagu pengiring acara televisi.

Kini, penting bagi kita mempertanyakan kembali spirit reflektif dalam lagu-lagu itu. Sekadar jadi syair yang dinyanyikan atau mengandung semangat penyadaran yang dapat tersalurkan lebih

konstruktif dalam memaknai kedudukan ibu dalam kehidupan?

Populer

Harus diakui, di satu sisi lagu lebih mudah jadi saluran menyampaikan pesan ke masyarakat mengenai sosok ibu. Pesan moral lebih komunikatif disampaikan lewat lagu daripada dengan media lain, seperti buku, artikel, apalagi pidato.

Lagu Iwan Fals, Melly Goeslaw, dan Opick itu akhirnya membuktikan dapat menghapus sekat kesakralan lagu “kenangan personal” menjadi bentuk baru dengan semangat refleksi yang mengini dan populis. Setidaknya lewat lagu itu mereka berhasil membawa spirit baru bagi masyarakat untuk kembali merenungi sejarah personalitas dan jadi rujukan sosok dengan sifat mulia, yaitu kasih, cinta, dan tanggung jawab ibu.

Lagu kenangan personal mengenai ibu yang populis itu menjadi warna baru dalam percaturan musik di Tanah Air. Patut diingat, lagu-lagu bertema ibu memang sangat sedikit dibandingkan tema cinta. Artinya lagu-lagu itu mungkin cukup mewakili iklim musik di Indonesia yang kurang variatif secara tematis.

Lagu bertema ibu itu lebih populer dan familiar di telinga setiap lapisan masyarakat. Lagu-lagu itu tak hanya untuk dinyanyikan, tetapi juga dapat memberikan hikmah untuk menghormati ibu sepanjang masa.

Kebudayaan

Itu membuktikan musik telah menjadi bagian penting dalam kebudayaan. Ia terus hadir, hidup, dan menyertai alam pikiran. Berabad-abad musik sebagai salah satu medium ekspresi budaya menyatu dalam struktur kebudayaan masyarakat.

Terbukti, semua komunitas hampir pasti selalu memiliki genealogi musik atas dasar etnisitas, agama, dan bangsa yang mereka warisi. Musik adalah “percakapan besar kebudayaan”, representasi beragam maksud dan pemikiran, yang luruh menampung semua pendekatan artistik.

Musik bisa selalu memainkan peran secara mandiri sebagai kritik kebudayaan. Pada saat yang sama, musik dapat memainkan peran sebagai bagian dari strategi kebudayaan nasional. Sebagai arena kebudayaan, di dalam musik, terefleksi dan tersimpan nilai-nilai sosial kultural, spiritualitas, ideologi, serta kritik sosial pada zamannya. Itu berlangsung dalam dua medium: lirik lagu dan musik itu sendiri (Tompi, 2010).

Pada konteks ini, musik adalah salah satu produk budaya yang akan senantiasa berkembang, menjelma menjadi bentuk baru untuk menuruti kehendak zaman. Menarik bila kita juga mempertanyakan seberapa jauh sumbangan lagu-lagu kenangan-populis generasi muda kita dalam membawa perkembangan perilaku bangsa.

Ataukah, justru dalam lagu-lagu itu, makna reflektif nilai dan makna kekeluargaan hanya secuil dan tertimbun di antara semangat kapitalisme populis? Layaknya lagu-lagu masa kini, lagu-lagu bertema ibu (yang kebanyakan dianggap melankolis) saat ini hanya jadi pelipur lara bagi kaum

utopia di tengah hiruk-pikuk negeri yang dilanda krisis nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Maka, melalui lagu-lagu bertema sosok ibu, kita diajak merevitalisasi pikiran bahwa keluarga adalah bangunan tempat kita mulai membenahi hal-hal dalam kehidupan bersama. Musik dalam rangka multikulturalisme kritis (Danusiri, 2004) semacam itu adalah musik yang melampaui batas personalitas dan menawarkan peran reflektif yang kontekstual. Bisa jadi ia menampilkan kembali “kesadaran rasa bersalah” yang harus kita telan lebih dahulu sebagai kedewasaan dan penghormatan atas sesuatu yang paling dekat dengan kita, yakni ibu, sebagai bagian dari keluarga dan orang tua, sebelum kita bisa bicara dalam satuan lebih besar.

Lagu bertema ibu bertutur mengenai hal yang telah lama hilang itu. Ia memang tak mengajukan gagasan canggih tentang masa depan. Namun ia berangkat dari satu titik yang tepat, bicara tentang apa yang ada dan bagaimana seharusnya menyikapi keluarga: konsep nilai lama yang pelan-pelan tergusur entah karena apa dan siapa. Dengan pemikiran semacam itu, revisi dan revitalisasi peran ibu (dan kaum perempuan) jadi penting bagi kehidupan saat ini. (51)

- Andriani Agustina SSos, peminat kajian gender, alumnus UNS Surakarta, tinggal dan bekerja di Jakarta

BERITA 11

18 Mei 2011

SAAT IBU MEMBACAKAN BUKU

- Oleh Mohamad Fauzi

IBU melahirkan anak tidak hanya sebagai anak biologis, tetapi juga (calon) intelektual. Selama ini, anggapan kita hanya sampai pada ibu sekadar “ibu biologis” dan tidak berhubungan dengan “ibu intelektual”. Pemahaman keliru itu harus segera direvisi.

Dalam buku *The Absorbent Mind*, tokoh pendidikan anak Maria Montessori (2008) menyatakan seorang bayi mengembangkan kemampuan berbahasa, modal intelektualnya, hanya dalam waktu tiga bulan. Bayi adalah manusia jenius bahasa yang alami.

Saat dilahirkan, bayi manusia sudah memiliki alat bahasa, yaitu pendengaran dan pengucapan, selain struktur internal sistem saraf kimiawi dalam otak (elektris). Kemampuan pengucapan biasanya mulai berfungsi saat umur satu tahun. Pendengaran akan langsung berfungsi untuk belajar bahasa yang biasanya dimulai dari mendengarkan. Modal bahasa itulah yang akan menjadi daya rasional dan imajinasi anak kelak.

Namun tentu bayi tidak dibekali bahasa sejak lahir. Bahasa adalah sistem kebudayaan yang dibuat manusia. Maka lingkungan belajar bayi sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan, kemajuan, dan kemahiran berbahasa yang akan digunakan kelak sebagai modal awal intelektualitas. Lingkungan yang paling kecil dan paling luas itu adalah sang ibu.

Keajaiban Membaca

Fauzil Adhim (2007: 74) dalam buku *Positive Parenting* menceritakan seorang bayi bernama

Jennifer yang menyandang keterbelakangan mental (down syndrome), yang ditandai rendahnya IQ. Jennifer juga hampir tuli, buta, dan mengidap keterbelakangan mental parah. Namun ibu Jennifer, Marcia Thomas, membacakan 11 buku setiap hari. Hasilnya: IQ Jennifer naik menjadi 111 pada usia empat tahun.

Sebuah keajaiban membaca, lompatan-lompatan kecerdasan terjadi dan dialami bayi. Sebab, membaca adalah aktivitas kompleks yang meliputi delapan aspek: sensori, persepsi, sekuensial, pengalaman, berpikir, belajar, asosiasi, dan afeksi. Maka, bagaimana jika semua itu dilakukan pada anak normal?

Tak mengherankan jika Daoed Joesoef, menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 1978-1983, dimandikan sang emak di Sungai Baboera saat hendak menyambut malam Nuzulul Quran dan awal mula belajar membaca yang dimulai dengan membaca Iqra berulang-ulang, surat pertama dan perintah pertama dalam Alquran.

Satu lagi bukti keajaiban membaca yang dihadirkan ibu adalah apa yang dialami oleh penulis muda, Eva Maria Putri Salsabila dengan nama pena Putri Salsa (14 tahun), dan Abdurahman Faiz (14 tahun). Putri Salsa menulis sejak umur lima tahun dan menerbitkan buku pertama ketika berumur delapan tahun, Dunia Caca. Sejak itu telah terbit Anak Penangkap Hantu, The Cute Little Ghost: Hanti-hantu Imut, Cool Skool, My Candy, My Chrystal, Maryamah Mah Kapok, yang sebagian menjadi best seller. Faiz telah menerbitkan 12 buku. Karyanya antara lain Untuk Bunda dan Dunia yang jadi best seller, Guru Matahari yang masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award 2005, buku kumpulan esai Permen-permen Cinta untukmu, Aku Ini Puisi Cinta yang mengantarkannya menjadi Penulis Cilik Berprestasi dari Yayasan Taman Bacaan Indonesia 2005. Kedua penulis muda itu sejak kecil diasuh dengan buku dan oleh ibu yang sama-sama pencinta buku dan penulis, Asma Nadia dan Helvy Tiana Rosa.

Ibu Inspiratif

Ahirnya, ibu sebagai inspirasi dan kebutuhan untuk mengabdikan dalam laku menulis. “Setiap orang di satu waktu tentu akan merujuk pada perilaku dan ucapan-ucapan ibunya. Kini tiba saatnya bagiku untuk melakukan hal tersebut,” tulis Daoed Joesoef (2003) dalam prolog buku Emak yang menceritakan peran sang ibu dalam kehidupan intelektual-akademisnya. Dan, kelak, banyak anak akan memberikan kata persembahan seperti Sindhunata dalam buku Anak Bajang Menggiring Angin: “Buat Mamie Tercinta”, karena telah membentuk-memberikan semangat dan inspirasi intelektualitas sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan.

Namun saya terkadang pesimistik. Banyak anak, sejak

bayi diasuh oleh media yang jelek dan tidak manusiawi. Apalagi tidak ada perkumpulan para ibu pembaca-pendongeng di Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, ada “bingkisan buku” dengan klasifikasi umur anak khusus untuk kelompok ibu pembaca-pencerita dari beberapa penerbit. Di Indonesia, para ibu belum menjadikan aktivitas membacakan buku dan mendongeng sebagai kebutuhan pokok dalam mengasuh anak, sehingga sampai sekarang penerbit buku masih mengabaikan. Para ibu sepertinya lebih tertarik berkumpul untuk arisan daripada belajar cara membaca dan mendongeng untuk anak-anak mereka. Sampai kapan hal itu dibiarkan?

Padahal, dalam banyak kasus dan sebagaimana sejarah memberitakan, ibu adalah guru pertama bagi anak. Dan, rumah adalah tempat pendidikan pertama. Dari seorang guru pertama dan tempat pendidikan pertama, anak berangkat menuju masa depan.

Maka persiapkan pijakan yang kuat dan mimpi kesuksesan masa depan bagi setiap anak. Antar mereka ke pintu masa depan dengan seluruh bekal yang dibutuhkan. (51)

- Mohamad Fauzi, mahasiswa Sastra Inggris UNS dan bergiat di Bale Sastra Kecapi Surakarta

BERITA 12

01 Juni 2011

PARADIGMA BARU FEMINISME

- Oleh U'm Qomariyah

BICARA feminisme tak bisa dilepaskan dari upaya perempuan mencari keadilan. Banyak hal membuat gerakan itu lahir. Namun satu yang terasa, pemikiran feminisme berpangkal dari kritik terhadap konstruksi patriarki yang mendominasi dan mengopresi perempuan.

Semua gerakan di lingkup wacana dan praktik itu bermuara dari perlakuan berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan menyuarakan keadilan melalui cara tersendiri.

Kisah superioritas laki-laki bisa dikatakan bermula dari cerita penciptaan manusia dalam Bibel yang sangat umum dikenal, yakni Adam diciptakan lebih dahulu dan Hawa diciptakan darinya. Jadi Adam adalah kreator dari Hawa, sedangkan Hawa diciptakan untuk membantu Adam. Secara sosial dan moral, Adam lebih superior karena Hawa adalah penyebab mereka dikeluarkan dari surga — tempat yang secara hakiki abadi.

Demikian pula ketika Phytagoras, seperti dikisahkan Aristoteles, membuat tabel pengklasifikasian elemen-elemen yang berlawanan (oposisi biner). Dari tabel Phytagoras terlihat, laki-laki dan perempuan tak hanya “berbeda” tetapi juga “berlawanan”. Bahkan dari mitologi Yunani Dewa Osiris dan Dewi Isis sampai pada zaman serbamesin, laki-laki dan perempuan tak hanya dianggap berbeda, tetapi juga sebagai seks yang berlawanan.

Laki-laki dan perempuan dipolarisasikan dalam kebudayaan sebagai “berlawanan” dan “tidak sama”. Keduanya dianggap bertentangan sehingga melahirkan ketidakadilan gender yang mendorong kemunculan gerakan feminisme.

Bingkai Feminisme

Saya tak akan mengungkap seberapa jauh ketimpangan itu, meski berhubungan, tetapi lebih mengemukakan ide feminisme yang banyak dibicarakan, ditelaah, dan dijadikan referensi dalam berbagai disiplin ilmu.

Pembicaraan soal feminisme biasanya melibatkan tiga aliran utama, yakni feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme marxis. Feminisme liberal lebih memprioritaskan hak perempuan dalam berpolitik di atas hak ekonomi. Kelompok itu dikritik karena secara umum hanya menyentuh kalangan perempuan terdidik dan kelas menengah. Juga karena lebih melihat

pekerjaan perempuan di luar lebih baik ketimbang di wilayah domestik (ibu rumah tangga) yang dianggap opresif. Pertanyaannya, bagaimana jika perempuan memang memilih wilayah domestik ketimbang publik?

Feminisme radikal dikritik karena dasar pemikiran yang radikal, terutama melihat laki-laki dan perempuan harus sama secara seksual (alami) dan gender. Mereka beranggapan reproduksi perempuan merepotkan, bahkan sebagai kutukan. Dalam memperjuangkan hak perempuan, seharusnya laki-laki dianggap “musuh” karena merekalah yang menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan.

Feminisme marxis mendesak perempuan berkiprah di ranah publik dengan tetap mengindahkan tugas domestik. Namun selain kampanye upah untuk pekerjaan rumah tangga, kelompok itu dikritik dalam kaitan dengan konsepsi simplistik mengenai sifat dan fungsi pekerjaan perempuan sebagai satu-satunya alat, dan sebagai alat terbaik untuk memahami opresi terhadap perempuan.

Ketiga pemikiran feminisme itu merupakan garis besar ide feminisme yang melahirkan banyak pembicaraan yang memberikan celah untuk menemukan konsep baru dengan memberikan batasan dan garis besar sehingga melahirkan bentuk-bentuk feminisme baru. Itu antara lain, seperti diungkap Putnam Tong (2008), adalah feminisme psikoanalisis, feminisme eksistensialis, feminisme postmodern, feminisme multikultural, dan ekofeminisme.

Terlepas dari pemikiran feminisme yang bermula lahir dari Barat sehingga barangkali secara kasatmata sangat berbeda dari budaya Timur, tak ada yang salah dengan pemikiran besar feminisme. Sebab, semua berangkat dari asumsi dan sudut pandang berbeda. Ibarat melihat subjek dari bingkai berlainan, pencahayaan yang dihasilkan memantulkan fokus berbeda pula. Namun jadi terkait ketika dalam berbagai forum seperti pembicaraan mengenai feminisme, mengenai hakikat perempuan, tak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran Barat itu. Menjadi terkait ketika kita terjebak dengan hakikat feminisme yang sepertinya sudah dikotak-kotak. Lebih-lebih ketika seseorang yang beragama, seorang muslim misalnya, membincang feminisme. Barangkali jika saya bicara mengenai budaya jelas akan terbantahkan karena ide-ide feminisme lahir dari ketimpangan gender yang berpangkal juga dari konstruksi budaya. Namun jika saya sebagai muslim harus membincang perkara perempuan berkaitan dengan feminisme, definisi seperti apa yang harus saya konstruksikan, paradigma seperti apa yang harus saya gunakan?

Feminis Muslim?

Selalu ketika bicara mengenai feminisme, baik tataran praktik langsung maupun wacana seperti teks sastra, akan dibenturkan dengan kenyataan bahwa ide feminisme berbeda dari dogma agama dan budaya. Sepertinya keduanya berbeda. Bahkan dalam berbagai referensi ditemukan pembicaraan mengenai dekonstruksi dalam wacana agama, khususnya teks kitab suci. Seolah-olah kitab suci (Alquran, misalnya) tak menyuarkan hak perempuan dan lebih membela laki-laki. Barangkali jika melihat pemikiran feminisme sebelumnya sangat dimungkinkan agama dan feminisme tak berhubungan.

Dalam Alquran ada beberapa ayat yang mengungkapkan kekhususan perempuan, yang tak dialami laki-laki. Begitu pula sebaliknya.

Namun kekhususan itu sering disalahpahami dan dijadikan alasan memojokkan perempuan, sehingga menimbulkan bias gender. Memang persoalan konseptual akan muncul bila ada benturan antara ketentuan nash yang bersifat universal dan permanen serta nilai budaya yang bersifat lokal dan temporer.

Tak ada alasan menjadikan seorang muslim tak bisa menyuarakan feminisme atau menyatakan feminisme tak berkaitan dengan agama. Artinya, untuk menyuarakan keadilan gender, perempuan tak perlu menanggalkan agamanya. Atau sebaliknya ketika berbicara agama, feminisme selalu bisa dilihat dari sana. Feminisme yang dibingkai dengan kaca mata agama akan melahirkan keadilan hakiki yang (lebih) tidak bias dan (lebih) jelas. (51)

- U'um Qomariyah SPd MHum, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Unnes

BERITA 13

08 Juni 2011

BELENGGU POLITIK PEREMPUAN

o Oleh Misbahul Ulum

POLITIK, selama ini hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Maka, perilaku politik yang tampak adalah merebut, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan.

Hans J Morgenthau, dalam *Political Among Nations* mengungkapkan bahwa politik merupakan perjuangan menuju kekuasaan. Pemaknaan politik seperti itu jelas menyesatkan. Karena, segala sesuatu hanya diarahkan kepada kekuasaan saja, dan sangat identik dengan kekerasan, sehingga muncul anggapan bahwa politik itu sangat kejam. Politik hanya boleh dilakukan oleh orang yang siap dengan kekerasan, dan laki-laki lah yang sejauh ini dirasa mampu untuk itu. Akhirnya timbul kesan bahwa politik menjadi "dunia terlarang" bagi kaum perempuan.

Dalam Islam, terminologi politik dikenal dengan nama siyasah, yang bermakna mengurus. Orang yang melakukan pengurusan itu disebut siyasiy (politikus). Dari uraian tersebut terlihat bahwa politik berkaitan erat dengan kegiatan pengaturan, pengurusan, dan pemeliharaan berbagai urusan kemasyarakatan.

Bila mengacu pada pengertian ini, jelas sekali tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dengan politik, sehingga tidak ada masalah jika perempuan harus ikut terlibat dalam kegiatan politik. Karena bagaimanapun, perempuan juga perlu diatur kebutuhannya.

Kurang Hasrat

Di Indonesia, mayoritas perempuan kurang memiliki hasrat untuk terjun dalam dunia politik. Hal itu disebabkan oleh empat faktor. Pertama; perempuan masih terbelenggu oleh kultur patriarki, yaitu suatu kebudayaan yang mengistimewakan peran laki-laki.

Misalnya perbedaan upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Biasanya upah untuk laki-laki lebih tinggi dibanding upah perempuan. Hal semacam itu terjadi karena masyarakat masih

beranggapan bahwa pekerjaan laki-laki lebih berat daripada perempuan. Contoh lain, ungkapan Jawa "sepikul se-gendongan", yang berarti, laki-laki mendapat sepikul atau dua kali lipat dari bagian perempuan yang hanya segendongan.

Kedua, pemahaman keagamaan yang parsial. Seringkali teks-teks keagamaan dimakanai secara tekstual saja tanpa mencari spirit apa yang dikandung dalam teks tersebut, sehingga perempuan seolah makin termarginalkan oleh dogma agama. Padahal dalam Alquran, Allah telah berfirman bahwa "laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, dan perempuan adalah pakaian bagi laki-laki". Jadi, interaksi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki bukanlah bottom-up tapi kemitraan. Dalam sebuah hadis juga telah disebutkan bahwa "sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari fisiknya, akan tetapi Allah melihat dari hati dan perilakunya".

Ketiga, sistem politik yang tak memihak perempuan. Meskipun sudah ada peraturan tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, ternyata perempuan harus bersaing terlebih dahulu dengan calon-calon legislatif lain yang didominasi oleh laki-laki. Harusnya, keterwakilan perempuan menjadi hal yang mutlak, bukan karena hasil kompetisi dengan laki-laki.

Karena jika perempuan harus berkompetisi terlebih dahulu dengan laki-laki, kekalahan menjadi hal yang sangat mungkin. Kalaupun ada perempuan yang menang, itu hanya beberapa saja. Keempat, kendala ekonomi. Selama ini, di Indonesia khususnya, tanggungjawab mencari nafkah dibebankan kepada laki-laki, sehingga muncul perasaan bahwa laki-laki lah yang mempunyai hak penuh dalam penguasaan harta kekayaan, sedangkan perempuan yang bekerja di wilayah domestik, dianggap tidak memiliki wewenang apa-apa dalam pengurusan kekayaan. Tentunya hal ini sangat menghambat perjalanan perempuan dalam memasuki dunia politik.

Karena, politik itu sangat mahal, dan hanya orang yang kuat secara finansial lah yang mampu berjalan pada rel itu.

Membangkitkan gairah politik perempuan pada era sekarang ini adalah sebuah keharusan. Dengan adanya wacana kesetaraan gender, tentunya itu menjadi peluang tersendiri bagi perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki dalam wilayah publik.

Paling tidak, perempuan harus memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri sebagai perempuan.

Gerakan politik perempuan hanya akan menjadi wacana kosong jika perempuan sebagai aktor penggerakannya tidak berani tampil menyuarkan diri sebagai mitra dan kompetitor laki-laki. (24)

—Misbahul Ulum, pengajar di PMPI Center, Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo.

(/)

BERITA 14

13 Juli 2011

MENJADI GURU TKW

- Oleh Andi Andrianto

KASUS-KASUS kekerasan dan penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita (TKW), serta kasus gaji yang tak dibayar oleh majikan, pemerkosaan, hingga persoalan kematian yang kerap dialami tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, tak dapat diabaikan begitu saja.

Dari pelbagai kasus ditemukan fakta bahwa TKW yang mengalami persoalan pelik di luar negeri biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Muncullah kasus TKW diperkosa, dianiaya, dan dibunuh majikan. Jadi, masalah TKW berkulat pada persoalan klise, yakni di rumah tangga, tempat mereka bekerja.

Tragedi pemancungan Ruyati (54) di Arab Saudi —dulu ada kasus Siti Zaenab, Sulaimah, Dwi Mardiyah, Nurfadilah, Suwarni dan yang lainnya— hampir semua berada pada satu permasalahan yang sama, yaitu antara pembantu dan majikan. Kronologinya, majikan menganiaya, (berniat) memerkosa pembantu, dan pembantu membela diri yang kadang berujung pada kematian majikan.

Dari sini, masalah TKW mesti ada pembenahan, bukan saja pada tingkatan diplomasi ataupun negosiasi politik negara dengan pihak asing, namun perbaikan dari sisi internal-personal juga perlu dilakukan agar persoalan siklus (baca: majikan-pembantu) tak terjadi lagi terhadap TKW kita yang bekerja di luar negeri.

Dalam kerangka itulah, hemat penulis, ada hal urgen yang sejatinya dapat dilakukan negara atau pihak lain untuk membekali TKW dengan pengetahuan dan keterampilan. Tujuannya, supaya nilai tawar TKW kita dapat meningkat di mata negara lain, agar pahlawan devisa itu tidak hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga saja.

Selain memperkuat fungsi kelembagaan negara (Kemenakertrans, Deplu, BNP2TKI dan lainnya), dalam memberikan nilai tambah bagi TKW dengan pengetahuan dan keterampilan, penulis kagum dengan gagasan Martha Tilaar, pengusaha industri bahan kosmetik, yang tersentuh hatinya dan berempati dengan kondisi kehidupan yang dialami TKW. Martha berupaya menjadi guru TKW dalam rangka membekali mereka dengan keterampilan, termasuk dalam bidang merias. Ide itu tercetus, karena menurut Martha, mereka (baca: TKW) adalah buruh yang tidak berketerampilan, sehingga TKW kerap diperlakukan tak manusiawi oleh para majikan.

Solusi

Di mata penulis, gagasan itu sangat brilian, dan cukup memberikan solusi yang bersifat jangka panjang untuk menyelesaikan pelbagai persoalan TKW. Bukan dengan cara reaksioner, seperti yang ditempuh pemerintah yakni dengan kebijakan moratorium (penghentian sementara) TKI yang mulai berlaku 1 Agustus 2011 mendatang. Kebijakan ini hemat penulis hanya bersifat jangka pendek dan tidak memberikan solusi, karena dilakukan setengah hati, mengingat kebijakan ini hanya berlaku bagi TKI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga saja.

Pembekalan keterampilan bagi TKW menjadi fundamental mengingat hal itu sangat penting sebagai modal pribadi dan menjadi nilai tawar. Selama ini kita tahu, TKW yang mengalami pelbagai kasus kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan, umumnya adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang minim keterampilan.

Tentu hal ini bukan saja merugikan TKW secara personal, lebih dari itu, disadari atau tidak, juga telah melecehkan harga diri bangsa. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga akan memunculkan stereotip negatif terhadap TKW dan juga perempuan itu sendiri. Apalagi, di negara yang secara sosial lebih mengedepankan hukum patriarki (menempatkan laki-laki di atas perempuan secara sosial), seperti Arab Saudi. Konstruksi budaya ini tentu akan memarjinalkan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Menjadi pembantu, lalu hidup di tengah lingkungan yang menganut hukum sosial patriarki, akan semakin merendahkan TKW kita di luar negeri.

Dalam konteks itulah, penulis benar-benar sepatutnya dengan ide brilian Martha, membekali TKW dengan seperangkat keterampilan. Bukan saja di bidang merias, tapi TKW juga harus memiliki keterampilan lain yang dapat menunjang kemampuan pribadinya. Menulis, menjahit, dan berjiwa wirausaha merupakan keterampilan lain yang dapat dibekali kepada TKW.

Dengan pembekalan keterampilan itu, paling tidak nilai tawar TKW meningkat dan pandangan orang lain terhadap TKW kita tidak lagi rendah. Dengan kalimat lain, stereotip negatif terhadap TKW dari hasil konstruksi budaya sedikit banyak dapat ditepis.

Akan tetapi, tak mudah merealisasikan gerakan ini secara massal. Apalagi, jumlah TKW Indonesia begitu banyak. Mungkin Martha dapat melakukan secara personal dan didukung kekuatan jaringan yang ia miliki. Namun, kita semua berharap, kepada guru-guru lain yang jumlahnya cukup banyak di negeri ini untuk mau membantu TKW dengan pelbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Bukankah sedikit ilmu yang dimiliki jika diamalkan kepada orang lain akan lebih bermanfaat, dibanding memiliki banyak ilmu tapi untuk diri sendiri, tentu ilmu yang dipunyai tak akan mendapat berkah atau manfaat di dunia ataupun di akhirat. (24)

—Andi Andrianto, pemerhati masalah sosial di Yogyakarta.

BERITA 15

20 Juli 2011

PEREMPUAN, TIANG EKONOMI KELUARGA

- Oleh Norbertus Kaleka

PERAN ekonomi kaum perempuan sungguh tak dapat diremehkan di negeri ini. Ketika krisis ekonomi sangat memberatkan kehidupan rumah tangga, kaum perempuan mampu tampil sebagai penyelamat dan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga.

Lentur, tidak mudah rapuh, apalagi patah. Itulah keunggulan sifat kaum perempuan. Dalam keadaan krisis yang menghimpit, mereka memiliki visi dan kreativitas. Mereka mampu meretas jalan keluar untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya.

Representasi peran ekonomi kaum perempuan dapat dilihat dari beberapa data berikut. Di Indonesia, jumlah korporasi ekonomi didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah usaha mikro sekitar 50,70 juta unit (98,90%), usaha kecil sekitar 520.220 unit (1,01%), dan usaha menengah 39.660 unit (0,08%), sedangkan usaha besar sekitar 4.370 unit (0,01%). Pelaku usaha, terutama usaha kecil, mayoritas atau 60-80% adalah kaum perempuan.

Cerita kelompok usaha besar beda lagi. Bisnis mereka yang menggurita karena pemerintah memproteksi pasar domestik untuk mereka. Bisa dibayangkan mereka jago kandang. Tetapi ketika

krisis moneter melanda kawasan Asia dan Indonesia, usaha besar bertumbuhan karena fondasi ekonominya rapuh. Sementara UKM bertahan, mampu survive, dan menyelamatkan negeri ini, sehingga tidak terpuruk lebih dalam. Kesimpulan yang bisa diambil, bila mayoritas pelaku UKM adalah kaum perempuan, maka mereka bukan saja menjadi penyelamat (baca: tiang) ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi tiang ekonomi negara yang kokoh.

Tetapi lebih sejahterakah kaum perempuan karena peran mereka yang demikian besar bagi negeri ini? Angka berikut bisa memberikan penjelasan.

Dari keseluruhan UKM, kontribusinya terhadap PDB (Product Domestic Bruto) mencapai Rp 2.609,4 triliun atau 52,6%. Nilai investasinya mencapai Rp 640,4 triliun atau 52,9%, dan pendapatan devisa Rp183,8 triliun atau 20,2% (Kompas, 14 Agustus 2010). UKM juga menyerap 97% pekerja di Indonesia. Usaha besar dengan jumlah unit usaha sekitar 0,01 %, menyerap sekitar 3 % pekerja Indonesia menghasilkan sekitar 48 % PDB. Artinya, kue ekonomi lebih banyak dinikmati oleh usaha besar, tetapi jutaan pelaku UKM yang menyerap puluhan juta tenaga kerja memperoleh bagian yang sangat kecil. Inilah wajah UKM sesungguhnya yang belum mampu memberikan kesejahteraan ekonomi, meski secara agregat mempunyai kekuatan yang sangat besar.

Belum Memihak

Gambaran makro dengan angka-angka, bila dikaji lebih detail merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang masih timpang dan belum memihak pada kaum kecil dan lemah.

UKM dengan mayoritas pelaku usaha perempuan masih dijauhi kucuran kredit bank untuk memperkuat usaha mereka. Dari total kredit bank yang mengalir ke sektor UKM sebesar 51,34% sedangkan usaha besar mendapatkan 48,66%. Sekali lagi usaha besar yang jumlah unit dan serapan tenaga kerjanya kecil, jauh lebih banyak mendapatkan kucuran kredit bank. Ketimpangan inilah yang belum memberikan darah segar bagi bangkitnya sektor UKM yang digerakkan oleh kaum perempuan.

Kaum perempuan sebagai pelaku UKM, dalam banyak kasus, juga sulit memperoleh kredit dan modal kerja atau investasi karena agunan yang mereka miliki, seperti rumah atau tanah, atas nama suaminya.

UKM juga tidak diproteksi pasarnya. Mereka bertarung sendiri melawan produk impor terutama dari China, baik legal maupun ilegal. Keinginan membesarkan UKM sering dibonsai sendiri oleh pemerintah, misalnya dengan kebijakan harga energi, kenaikan tarif dasar listrik, harga bahan baku yang tinggi, infrastruktur yang buruk, dan berbagai biaya lain yang dibebankan pada UKM. Kita mempunyai kepentingan yang mendasar mengapa kaum perempuan yang merupakan mayoritas pelaku UKM perlu didorong untuk bertumbuh dan berkembang.

Pertama, kaum perempuan memiliki etos kerja tinggi. Sebab itu, peluang ekonomi yang terbuka bagi mereka lebih menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Kedua, perempuan adalah sumber daya ekonomi yang sangat penting dan memiliki fungsi utama dalam peningkatan kesejahteraan. Sebab kaum perempuan lebih memprioritaskan pengeluaran pendapatannya untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Berbeda dari sebagian kaum pria yang tidak memberikan seluruh pendapatannya untuk biaya hidup keluarga karena digunakan untuk membeli rokok, minum, dan kadang judi yang hanya merupakan kesenangan pribadi kaum pria. Dengan demikian, perempuan memiliki fungsi utama dalam peningkatan kesejahteraan serta lebih berdaya guna untuk mengentaskan kemiskinan.

Tidak berlebihan bila kita meminta adanya komitmen politik yang lebih pro perempuan dalam alokasi anggaran melalui APBN dan APBD bagi kebangkitan ekonomi kaum perempuan. Berbagai kebijakan publik harus memberikan ruang yang luasa bagi ruang gerak dalam berusaha sehingga kaum perempuan lebih mampu memberdayakan dirinya sendiri. Bila kepercayaan lebih diberikan pada kaum perempuan, kita yakin bisa melihat Indonesia yang lebih sejahtera. (24)

—Norbertus Kaleka, alumnus Fakultas Pertanian UGM, pemerhati ekonomi rakyat.

BERITA 16

03 Agustus 2011

PUASA DAN "JIHAD" KAUM PEREMPUAN

- Oleh Siti Fathimatuz Zahroh AMG

Ramadan 1432 Hijriah sudah tiba. Umat Islam di berbagai penjuru dunia menyambutnya dengan suka-cita. Itu karena bulan Puasa "yang di dalamnya terdapat malam mulia" merupakan bulan yang penuh ampunan; pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Pendek kata, bulan Puasa adalah momentum tepat untuk mendekati diri kepada Allah SWT, dan memohon ampun atas segala dosa yang sudah dilakukan selama setahun lalu. Namun, tidak banyak yang menyadari kemuliaan bulan Puasa, khususnya para ibu rumah tangga. Tidak sedikit mereka yang mengeluh dan menyambut bulan ini dengan berat hati. Mengapa? Karena sudah pasti puasa akan menambah beban berat. Bagaimana tidak, mulai bangun sahur sampai berbuka puasa, merekalah yang paling repot. Harus bangun lebih awal agar hidangan bisa tersaji tepat ketika waktu sahur tiba. Sebaliknya, kaum pria sebagian besar tidak mau tahu, mereka akan makan sahur atau berbuka ketika semua sudah siap tanpa mau ikut membantu istri. Jika siang, kaum ibu harus "memutar otak" agar menu yang tersaji memenuhi unsur 'empat sehat lima sempurna', meski kondisi keuangan keluarga sedang defisit. Bagi keluarga ekonomi menengah ke atas, memang tidak masalah. Tetapi, bagi golongan ekonomi pas-pasan, merancang dan mengatur menu berbuka dengan sehemat-hematnya, bukan pekerjaan yang mudah. Itu belum jika penghasilan suami hanya pas-pasan; sang istri juga harus turut ngode atau bekerja.

Jihad Akbar

Bagi kaum perempuan yang punya anak balita atau tengah hamil, tentu lebih berat lagi. Selain sibuk mengatur menu buka puasa dan segenap kebutuhan keluarga, mereka juga harus mengurus buah hati agar tetap tumbuh dan kembang secara sehat. Boleh dibilang, kedatangan bulan Puasa merupakan ujian terberat kaum perempuan, khususnya para ibu rumah tangga. Jika kesabaran, ketakwaan, kebesaran dan ketulusan hati tidak menjadi sandaran, mereka tidak akan mendapat apa-apa di bulan Puasa; selain hanya lapar dan dahaga.

Ketika puasa datang, kaum perempuan, dalam bahasa Abidah El Khalieqy (2011), laksana melakukan jihad akbar. Mengapa? Karena pada bulan yang dimuliakan itu, mereka selalu mendapat halangan dalam menjalankan ibadahnya. Daur menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui merupakan fakta biologis yang menyebabkan perempuan tidak sepenuhnya dapat melaksanakan puasa sepanjang bulan. Oleh karena itu, lanjut Abidah, jika tak memahami maksud dan tujuan syariat Islam, serta fikih yang berkenaan dengan perempuan pada bulan puasa, bisa jadi akan timbul keragu-raguan di hati kaum perempuan terhadap ajaran Islam.

Akan tetapi, jika halangan-halangan puasa tersebut direnungkan secara lebih mendalam, sungguh, bulan Ramadan merupakan anugerah bagi kaum hawa untuk meraih kearifan. Suatu kenyataan spiritual yang secara spesifik tidak mungkin dialami oleh kaum laki-laki.

Hidup Wajar

Godaan lain yang teramat berat bagi kaum perempuan adalah dunia mode/fashion. Lihatlah, ketika puasa, aneka desain pakaian dengan menumpang istilah "busana muslim" menggoda kaum perempuan untuk berbelanja. Maka tidak heran jika mereka berlomba memperbarui busana, mukena, sajadah dan aneka pernik-pernik lain ketika bulan Puasa datang. Tidak heran jika kita sering menjumpai masjid atau mushala berubah layaknya stage model; di mana kaum perempuan memamerkan aneka desain perlengkapan ibadah mutakhir. Jika tidak arif dan selektif, bisa terjadi pertengkaran antara suami-istri.

Agar kaum perempuan juga bisa khusyuk menjalankan ibadah puasa, maka seyogianya kaum laki-laki sadar diri. Dengan kata lain, mereka juga harus berbagi peran secara adil, membantu tugas kaum perempuan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Membantu kaum perempuan, tentu tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis. Apalagi, bagi suami yang istrinya tengah hamil, harus mampu menjadi bapak yang menjaga, melindungi dan mengayomi dengan tulus. Ini akan sangat memengaruhi kondisi anak yang tengah dikandung. Jika kaum laki-laki tidak sempat membantu secara fisik, cukuplah mereka menciptakan suasana lingkungan rumah yang kondusif dan harmonis; bukan sebaliknya.

Sejatinya, tolong-menolong antara suami - istri itu, sudah lama dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad saw terhadap istri-istri beliau. Sebuah riwayat menyebutkan, Nabi menjahit dan mencuci jubah yang dikenakannya sendiri. Jika panutan kita saja mencontohkan hal mulia, mengapa kita sebagai umatnya tidak meneladani?

Tidak mudah memang bagi suami untuk sadar dan legawa membantu tugas istri di bulan Puasa. Ada saja alasannya; entah semalam begadang tadarus, lelah bekerja di kantor dan sebagainya.

Meski berat, tetapi demi sang istri tercinta, kaum laki-laki harus turun tangan membantu. Yang lebih penting, seyogianya setiap keluarga muslim memperlakukan bulan Puasa secara wajar, sebagaimana bulan-bulan yang lain secara ekonomi. Artinya, budaya konsumtif yang memuncak berbarengan dengan hadirnya bulan Puasa, mestinya ditekan sedemikian rupa, agar tidak seperti pepatah: besar pasak dari pada tiang.

Berdasarkan pengalaman bulan Puasa yang lalu, oleh sebagian umat Islam, puasa malah digunakan untuk mengumbar hasrat konsumerisme. Seperti diberitakan salah satu koran nasional, tahun lalu omzet penjualan retail melonjak hingga 50 persen daripada bulan biasanya. Bagi keluarga muslim yang berlebih, alangkah mulianya jika anggaran untuk berbuka "yang tidak sewajarnya" disalurkan untuk kerja atau usaha pengentasan kemiskinan. (24)

—Siti Fathimatuz Zahroh AMG, ibu rumah tangga, alumnus SMA MTA Surakarta.

BERITA 17

24 Agustus 2011

MUDIK DAN BEBAN PEREMPUAN

- Oleh Siti Fathimatuz Zahroh AMG

HARI Raya Fitri 1432 H akan segera tiba. Kesibukan terasa di kalangan para perantau yang bekerja di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Mereka mulai berkemas untuk pulang kampung, atau yang lebih populer dengan istilah mudik.

Tradisi mudik merupakan kegiatan pulang ke kampung halaman bersamaan dengan datangnya Lebaran. Terdapat fenomena yang unik, menarik, bahkan di luar akal rasional dalam tradisi mudik. Menurut Mircea Eliade (1999), tradisi mudik merupakan salah satu kawasan teritori sakral yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Seorang muslim yang mengaku paling rasional-pun, ketika hari-hari menjelang Lebaran kemudian tak pulang mudik, ia akan sangat bersedih dan menitikkan air mata. Ada perasaan mengganjal, di mana dirinya ingin pulang kampung halaman, menemui keluarga tercinta. Karena tuntutan batin itulah, berbondong-bondong orang mudik!

Tidak Ringan

Kegiatan mudik itu bukan pekerjaan ringan. Selain menghabiskan tenaga, pikiran, harta benda, juga butuh kondisi kesehatan yang prima. Bagi kaum perempuan atau ibu rumah tangga yang ikut suami merantau, mudik menjadi kegiatan yang menguras tenaga dan melelahkan.

Bagaimana tidak, hampir sebagian besar persiapan untuk mudik itu, merekalah yang amat berperan. Mulai dari mengepak pakaian, menyiapkan bekal, menyiapkan anggaran untuk zakat fitrah, zakat mal, sampai memilih dan membeli oleh-oleh untuk keluarga di desa. Untuk kegiatan ini, para istri harus mampu mengatur dana sejiel dan sehemat mungkin; agar cukup selama mudik ke kampung halaman maupun ketika balik lagi.

Mengatur pengeluaran untuk mudik, tentu bukan perkara mudah; apalagi jika penghasilan suami yang pas-pasan. Sang istri harus betul-betul selektif; mana yang membutuhkan anggaran dan mana yang tidak perlu. Pendek kata, jika para istri tidak bisa mengatur anggaran dengan baik, bisa jadi mereka tidak mudik.

Bagi mereka yang masih mengandung atau punya anak kecil, untuk mudik tentu butuh pengorbanan yang ekstra. Menjaga kandungan dalam perjalanan mudik, bukan tanpa risiko. Akibat banyaknya penumpang yang berebut untuk bisa shalat Idul Fitri di kampung halaman, berbagai moda transportasi penuh sesak. Belum lagi ancaman tindak kejahatan, seperti pencopetan, perampokan, hipnotis, gendam dan sebagainya. Pendek kata, mudik bagi perempuan hamil atau memiliki anak kecil taruhannya adalah nyawa.

Menurut sebagian pakar ekonomi, tradisi mudik itu sejatinya termasuk kegiatan pemborosan; karena menghambur-hamburkan uang tanpa imbal-balik secara ekonomis. Bagaimana tidak, demi bisa pulang kampung tepat sebelum shalat id, orang rela membayar mahal, bahkan harus menguras tabungannya. Padahal, tabungan itu dikumpulkan dengan susah-payah selama setahun lebih.

Akan tetapi, terdapat kearifan dalam tradisi mudik yang nilainya jauh lebih tinggi dari hitung-hitungan ekonomi. Kebenangan hati plus kesadaran untuk selalu ingat akan asal-usul atau sangkan paraning dumadi, adalah mukjizat ruhani mudik. Hal inilah yang menurut Jacob Sumarjan (2007), tidak bisa dibeli dengan harta benda atau materi apa pun.

Kelebihan tradisi mudik yang lain, adalah pada kesehatan psikologis. Logika sederhana, orang yang habis mudik pasti akan sakit; baik secara jasmani atau psikologis. Nyatanya hal itu tidak

terjadi. Mudik justru menjadi semacam terapi psikologis yang ampuh, lebih-lebih bagi mereka yang selama 10 bulan menderita stres lantaran problem pelik perkotaan. Maka ketika mudik, segala beban itu cair seketika karena menatap wajah-wajah lugu penduduk desa, penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Begitu hendak kembali ke tempat kerja, semangat telah pulih kembali.

Tidak Berlebihan

Meski tradisi mudik memiliki banyak sisi positif, tetapi ada juga sisi negatif yang harus dihindari jauh-jauh. Di daerah pedesaan, tradisi mudik tidak jarang menjadi ajang pamer keberhasilan seorang perantau.

Mereka akan melakukan apa saja yang bisa menunjukkan keberhasilan di tanah rantau. Seperti berbagai piranti elektronik, kendaraan, dan sebagainya. Para istri juga tidak mau ketinggalan; mereka memaksakan diri membeli berbagai jenis barang perhiasan atau aneka model pakaian mutakhir. Jika kebetulan penghasilan sang suami pas-pasan, tidak jarang mereka utang demi membeli pernak-pernik yang akan dipamerkan itu. Maka tidak sedikit perantau yang menumpuk hutangnya, pascamudik.

Sisi negatif lain adalah budaya menghambur-hamburkan uang di kalangan pemudik. Mereka rela menghabiskan uang untuk bersenang-senang atau bermewah-mewah saja. Alasannya, mumpung di tanah kelahiran dan hanya dilakukan setahun sekali. Maka ketika tradisi mudik usai, kampung halaman kembali sepi, ekonomi mulai lesu kembali, sementara penduduk lokal tertarik kemegahan yang dipertontonkan para perantau. Akibatnya, penduduk desa ramai-ramai menjadi perantau dan menjadi beban baru masyarakat perkotaan.

Beberapa sisi negatif dari tradisi mudik itu, semestinya mulai ditinggalkan. Tradisi mudik sudah saatnya disikapi secara bijak dan tidak berlebihan. Alangkah tidak elok, demi untuk mudik, seorang perantau harus utang sana-sini; apalagi harus meminjam bank atau pegadaian. Dalam hal ini, kaum perempuan memiliki andil yang cukup besar guna meminimalisasi dampak negatif mudik. Mereka harus bisa menjadi "pengerem" atas budaya konsumtif yang membuncih ketika mudik; tidak saja bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi suami mereka. Bukan malah istri menjadi "tukang kompor" budaya konsumtif bagi suami mereka.

Karena beban perempuan teramat berat ketika mudik, para suami semestinya tahu diri. Mereka harus mau membantu sang istri yang payah mempersiapkan segala sesuatu untuk mudik.

Para suami juga harus menjadi sosok pengayom sekaligus pelindung bagi istri dan anak-anaknya ketika mudik. Singkatnya para suami harus mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.

Selamat Hari Raya Fitri 1432 H, mohon maaf lahir dan batin. (24)

—Siti Fathimatuz Zahroh AMG, ibu rumah tangga, alumni SMA MTA Surakarta.

BERITA 18

21 September 2011

PEREMPUAN DAN KORUPSI

- Oleh Tri Wahyuni Kurniasih

KORUPSI di negeri ini telah berada di stadium empat. Sangat membahayakan. Berbagai kasus pun telah terkuak, melibatkan sejumlah petinggi negara, baik yang duduk di DPR maupun di kementerian negara.

Rentetan kasus korupsi itu merupakan salah satu bentuk kejahatan sosial yang merugikan semua pihak dan merusak sendi-sendi kehidupan. Dalam literatur, menurut pakar hukum M Yanuar (2011), kejahatan korupsi yang berhubungan dengan penguasa dapat dikategorikan sebagai

political corruption (korupsi politik). Korupsi ini melibatkan para pembuat keputusan dan kebijakan politik yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Korupsi jenis ini dilakukan secara berjamaah, sistemik dan terorganisasi dengan rapi, sehingga sulit untuk diungkap secara tuntas.

Pelaku korupsi dalam sejarahnya, banyak didominasi oleh kaum lelaki, karena mereka lebih banyak berhubungan langsung dengan kekuasaan, jabatan, dan sejumlah pemegang kebijakan. Kemudian bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan bisa dikatakan sebagai pemicu munculnya korupsi, atau sebaliknya bisa menjadi penekan tindak pidana korupsi?

Peran Perempuan

World Bank (1999) pernah melakukan riset perihal peran perempuan dalam korupsi. Melalui riset yang dilakukan Development Research Group/Poverty Reduction and Economic Management Network itu, ditemukan kenyataan menurunnya tingkat korupsi bersamaan dengan kian meningkatnya jumlah perempuan di tingkat parlemen nasional. Riset tersebut menjadi pembener bahwa kaum perempuan banyak berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebagai contoh, awal Januari 2011, Dilma Rousseff dilantik sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden Brasil. Pertengahan Februari 2011, Brasil mengangkat Martha Rocha sebagai kepala polisi. Perempuan pertama kepala polisi Brasil ini diangkat karena bersih dari korupsi. Akhir Juni 2011, Christine Lagarde menjadi perempuan pertama Ketua Dana Moneter Internasional. Seminggu kemudian, Yingluck Shinawatra terpilih sebagai perempuan pertama Perdana Menteri Thailand (Neta S Pane, 2011).

Para perempuan ini tampil di muka publik dengan memiliki keyakinan dan dedikasi yang tinggi untuk berjuang tanpa pamrih melakukan perubahan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bagaimana dengan Srikandi-Srikandi Indonesia? Kasus-kasus korupsi kini tengah mendera sejumlah kaum perempuan Indonesia.

Banyak kasus, misalnya, beberapa waktu yang lalu, Artalyta Suryani terlibat dalam kasus penyuapan jaksa Rp 5,9 miliar. Nunun Nurbaeti buron dalam kasus cek perjalanan. Malinda Dee mengeruk dana nasabah Citibank. Mindo Rosalina Manulang terlibat kasus suap proyek Wisma Atlet. Imas Diansari, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung, tertangkap basah menerima suap Rp 200 juta dari Manajer PT Onamba Indonesia Odi Juanda.

Dari 26 anggota DPR yang terlibat kasus cek perjalanan, ada dua perempuan menjadi tersangka, yaitu Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina. Keduanya menerima suap sesuai memilih Miranda Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

Baru-baru ini, Kemenakertrans juga diguncang korupsi, salah satu tersangka adalah Dharnawati, yang mencoba melakukan suap.

Peran perempuan yang menduduki sejumlah jabatan penting di negeri ini tumbang satu per satu karena terlibat korupsi. Ini menunjukkan bahwa rasa malu sejumlah perempuan telah memudar, tergoda oleh legitnya kue korupsi.

Keterlibatan beberapa perempuan Indonesia dalam kasus-kasus korupsi seakan mematahkan hasil penelitian yang dilakukan World Bank (1999). Perempuan bisa dengan leluasa memegang kontrol dan pengaruh bagi laki-laki yang salah langkah dan salah arah.

Selama ini, perempuan diasumsikan lebih telaten dan lebih kecil kemungkinannya melakukan korupsi. Anggapan tersebut kini tidak sepenuhnya benar. Akses perempuan di dunia publik dan panggung politik baru hadir belakangan.

Kaum laki-laki lebih mendominasi ruang publik. Ketika akses itu dibuka dan perempuan sudah mulai masuk ke ruang publik, mereka ternyata sama rentannya dengan laki-laki.

Fungsi Ganda

Fungsi perempuan ketika menjadi ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab moral terhadap anak-anaknya. Bagaimana penilaian dan dampak psikologi seorang anak jika ibunya seorang koruptor? Inilah yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan kaum perempuan agar memiliki rasa malu untuk tidak melakukan korupsi. Selain itu, di lingkungan domestik, perempuan juga bisa berperan mencegah suami berbuat korupsi dengan menunjukkan empati, kasih sayang, dan pengurusan rumah tangga yang baik, yang tak banyak menuntut pemenuhan materi.

Pengikutsertaan perempuan dalam mengatasi korupsi memang lebih bersifat substansial yang jarang diakui dalam bingkai budaya patriarki. Karena itu, konsep pendekatan kultural melalui institusi sosial terkecil, yaitu keluarga, diharapkan bisa mengurangi budaya korupsi.

Peluang bagi perempuan untuk menjadi pelaku korupsi atau sebagai pencegah korupsi, terbuka sama lebarnya. Sebagaimana pernah dikatakan Wakil Ketua KPK, M Jasin, bahwa perempuan pun bisa menjadi pemicu korupsi yang dilakukan suami. (24)

—Tri Wahyuni Kurniasih, pemerhati sosial, tinggal di Yogyakarta.

BERITA 19

28 September 2011

ROK MINI DAN PEMERKOSAAN

- Oleh Tri Marhaeni Pudji Astuti

SAYA selalu risau, bahkan sedih, setiap kali ada kasus perkosaan atau kasus pelecehan seksual. Masih saja ada komentar yang tidak memihak korban. Terlebih jika komentar-komentar tersebut dilontarkan oleh pejabat atau tokoh terkenal.

Ucapan para pejabat dan tokoh akan membentuk opini publik dan mencerminkan sosok yang berucap. Lebih bahaya lagi jika ucapan atau pendapat pejabat tersebut —entah baik atau buruk, benar atau salah— lantas meng-hegemoni pikiran masyarakat dan akhirnya menjadi konstruksi sosial.

Ucapan Gubernur DKI yang mengatakan bahwa: ”bayangkan jika dia duduk di depan pakai rok mini”, membuat saya kaget. Lho? Memangnya pakai rok mini harus diperkosa? Yang mengharuskan siapa? Padahal beberapa tahun yang lalu pernah juga ada kasus santri sepulang mengaji diperkosa. Mereka tidak pakai rok mini.

Komentar yang lebih ekstrem dilontarkan seseorang pejabat di Aceh ”perempuan tidak berjilbab patut diperkosa”. Saya semakin heran, siapa yang mematutkan? Kasus perkosaan bisa menimpa siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa deawsa dan anak-anak. Komentar senada juga akhirnya menjadi konstruksi sosial umum setiap kasus perkosaan terungkap, misalnya ”salahnya pakai rok mini dan bersikap mengundang”.

Lantas ketika ada nenek-nenek uzur dan anak balita di bawah usia 5 tahun diperkosa, apakah mereka berperilaku mengundang?

Kontruksi Sosial

Konsep perempuan adalah warga negara kelas dua, perempuan adalah the others atau kelompok lain dan sebagai objek, sementara itu, sebagai yang utama dan subjek adalah laki-laki, tampaknya menghegemoni pikiran masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki dalam kultur yang sangat patriarkat. Karena perempuan adalah objek, maka dia hanya bermakna ketika dia "dimaknai" oleh subjeknya (yakni laki-laki) dan objek itu menjadi milik subjeknya.

Konsep ini tampaknya lantas melahirkan perilaku "karena perempuan adalah milik laki-laki, maka sah-sah saja diperlakukan apa saja oleh pemiliknya". Bahkan konsep milik itu identik dengan barang benda yang bisa diperlakukan apa saja.

Dengan konsep yang demikian keliru itu tetapi telanjur menghegemoni para lelaki, maka setiap perempuan —tidak peduli dia siapa— adalah menjadi milik laki-laki yang bisa mengapakan saja barang miliknya.

Konstruksi ini menjadi semakin miris manakala masyarakat bersikap apatis bahkan mendukung konstruksi sosial tersebut karena merupakan bagaian yang melahirkan konstruksi sosial tersebut.

Tampaknya dalam konstruksi sosial dan realitas sosial, sosok perempuan masih harus berjuang lebih keras lagi untuk melakukan dekonstruksi yang tidak saja harus dilakukan oleh perempuan itu sendiri, namun juga oleh masyarakat.

Pandangan mendua masih terjadi dalam masyarakat kita. Manakala ada sosok perempuan yang tidak peduli pada penampilannya, tidak mau berdandan atau bahkan berdandan tidak rapi, tidak cantik tidak segar, langsung masyarakat berkomentar "perempuan kok nglomprot, nanti tidak laku". Giliran perempuan berdandan cantik, wangi, berpakaian seksi, lantas diperkosa.

Ini kan semacam ambiguitas yang masih terjadi di masyarakat. Apakah perempuan cantik, wangi, seksi, berpakaian mini harus diperkosa? Yang menghancurkan itu siapa? Ini merisaukan banyak perempuan yang sebenarnya juga sesama warga masyarakat dan warga negara.

Setengah Hati

Selalu yang terjadi adalah melakukan tindakan pencegahan ketika sudah terjadi kasusnya. Sama halnya dengan kasus perkosaan ini. Sekarang, razia "kaca film" di angkutan umum dilakukan di mana-mana.

Sebenarnya perlu affirmative action yang tidak setengah hati. Kebijakan untuk penyelamatan yang konsisten, bahkan cenderung intensif dan meningkat, jangan kebijakan yang hangat-hangat tahi ayam, sehingga dampaknya juga tidak setengah-setengah.

Karena kebijakan setengah hati juga akan membuat para pelaku perkosaan melakukan persembunyiannya sepenuh hati. Artinya dengan sepenuh hati para pelaku kejahatan perkosaan akan mengekang hasrat memerkosa, menunggu kebijakan usai, baru mereka beraksi lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan bahwa kebijakan itu hanyalah kebijakan sementara, kebijakan setengah hati yang nanti juga akan hilang dengan sendirinya.

Kalau pikiran para pelaku kejahatan perkosaan seperti ini, maka sebenarnya yang diperlukan adalah kesungguhan hati para anggota masyarakat untuk secara aktif dan konsisten berupaya

meminimalisasi terjadinya kejahatan perkosaan, agar para pelaku kejahatan juga dengan sepenuh hati mengekang hasratnya memerkosa. Kalau perlu sampai tidak ada celah dan tidak ada kesempatan sama sekali.

Sebenarnya dalam UU Ketenagakerjaan, perlindungan pekerja di malam hari sudah tertulis dengan indah dan rinci, tapi tampaknya uraian kewajiban untuk para pengusaha terhadap karyawan perempuannya, hanyalah merupakan rangkaian puisi amat indah dalam buku yang belum sepenuhnya dijalankan atau bahkan belum dipahami.

Sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita semua membuka wacana menciptakan diskursus bahwa "perempuan cantik, seksi dan pakai rok mini bukan saja tidak harus diperkosa, melainkan tidak boleh diperkosa. Karena tidak ada yang mengharuskan dan tidak ada yang membolehkan. (24)

—Tri Marhaeni Pudji Astuti, dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Unnes.

BERITA 20

05 Oktober 2011

PEREMPUAN DALAM RITUAL HAJI

- Oleh Siti Fathimatuz Zahroh AMG

KLOTER pertama jamaah haji Indonesia, telah diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 1432 Hijriah ini. Para tamu Allah itu hendak menunaikan rukun Islam yang kelima. Selain merupakan penyempurna rukun Islam, ibadah haji juga mengandung simbolisme tauladan dan kental akan nilai-nilai kemanusiaan. Simbolisme itu, salah satunya, mengenai peran mulia perempuan yang telah tertoreh dalam catatan sejarah.

Simbolisme dalam ritual sai, misalnya, mengingatkan kita akan sejarah perjuangan Siti Hajar. Istri Nabi Ibrahim AS ini, dikisahkan tanpa kenal lelah dan putus asa berusaha mencari air untuk putranya yang tengah kehausan. Konon, karena sehari-hari berada di gurun Arab yang gersang dan tandus, Siti Hajar kekurangan makan dan minum. Akibatnya, Siti Hajar tidak mampu mengeluarkan ASI-nya secara maksimal.

Demi untuk menyelamatkan anaknya, Ismail, Hajar berusaha mendapatkan air dengan berlari-lari naik turun bukit Shafa hingga Marwa. Sebuah jarak yang amat jauh untuk ukuran perempuan waktu itu, meski pada akhirnya Hajar tak menemukan air setetes pun. Untunglah mukjizat Allah SWT datang; melalui sela-sela kaki Ismail yang mungil, keluar mata air yang bisa diminum, sehingga putra Siti Hajar itu bisa tertolong. Konon, mata air dalam kisah Siti Hajar itulah yang kini menjadi sumur Zamzam.

Sosok Unggul

Teladan Siti Hajar, tulis Prof Dr Sri Suhanjati Sukri (2004), mengajarkan kita betapa perempuan itu bukan makhluk yang lemah ósebagaimana stigma miring yang selama ini dilekatkan kepadanya. Perempuan bukan makhluk yang hanya menjadi peran pengganti, bahkan cadangan

óyang keberadaannya laksana ada dan tiada. Tetapi, perempuan adalah sosok unggul yang mampu berpikir cepat dan tepat untuk mengambil keputusan; meski dalam kondisi darurat sekalipun.

Keberanian menghadapi tantangan, kemandirian bertindak, dan pengambilan keputusan itu sering dipersepsikan sebagai karakter maskulin yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Karena maskulinitasnya ini, laki-laki dipandang mampu melakukan tugas-tugas publik yang banyak tantangan. Namun dari kisah Siti Hajar, maskulinitas tidak hanya dimiliki laki-laki, tetapi juga perempuan. Karena itu, perempuan pada dasarnya juga berkemampuan sama dengan laki-laki, termasuk untuk berperan di wilayah publik.

Melalui simbolisme Siti Hajar itu juga, perempuan idealnya mampu bertindak cepat tanpa menggantungkan bantuan kepada siapa pun, kecuali mengharap pertolongan Allah semata. Teladan yang lain, adalah pentingnya menjaga amanah dari Allah SWT, berupa putra, sang buah hati. Siti Hajar mengajarkan betapa anak itu harus dilindungi, disayangi, diperlakukan secara arif dan bijaksana. Bahkan, nyawa dipertaruhkan demi keselamatan Ismail, putranya. Ini menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua, lebih-lebih kaum ibu, tidak sekadar memberikan nafkah, pendidikan, sampai menikahkan putra.

Ritual lain yang kental akan simbolisme penghargaan terhadap kaum perempuan adalah wukuf di padang Arafah. Konon, setelah dipisahkan dari surga dan berpisah selama bertahun-tahun, Adam dan Hawa bertemu lagi di pinggir kota Mekah. Mereka mengenali satu sama lain (ta'arafah) di Padang Arafah.

Simbolisme wukuf di Padang Arafah, selain merupakan puncak dari ibadah haji itu sendiri, adalah kewajiban untuk saling mengasihi antara laki-laki dan perempuan. Sebuah momentum di mana segenap umat manusia bertemu dan terdokumentasikan dalam simbol Jabal Rahmah. Sebuah simbol perdamaian dan ajaran bahwa Islam itu memuliakan perempuan, cinta perdamaian, bukan penganjur kekerasan, kerusakan dan kehancuran.

Haji Mabruur

Simbol-simbol dalam ibadah haji, diharapkan tidak hanya memperkaya horizon pengalaman beragama secara individual saja, tetapi juga bagaimana horizon itu mampu ditransformasikan pada dataran empiris-sosial. Artinya, orang yang telah berpredikat haji, diharapkan nantinya menjadi teladan moral bagi lingkungan sekitar.

Ibadah haji, mestinya juga menjadikan kaum laki-laki semakin menghargai dan menghormati kaum perempuan. Tauladan dari simbolisme dalam ritual haji hendaknya memperkuat langkah konkret merekonstruksi inferior perempuan.

Itu karena gaung gender saat ini, sebagian besar masih terhenti di tingkat wacana akademisi, belum menyentuh batin mayoritas kaum perempuan.

Diharapkan, praktik ritual wukuf di Arafah yang akan dilakukan jamaah haji menjadi inspirasi sekaligus sebuah ibrah (contoh) bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan bisa diluruskan hanya dengan metode, menasihatinya dengan arif dan bijaksana serta penuh kasih sayang.

Semua jamaah haji kita tentu berharap mendapat haji yang mabrur. Itu karena menurut hadis Nabi Muhammad SAW: al-haji al-mabrur laisa lahu al-jaza' illa al-jannah, bahwa balasan bagi haji mabrur adalah surga. Menurut Nurcholis Madjid (1997), kata mabrur jika ditinjau dari segi semantis (kebahasaan) berarti mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. Dengan demikian, al-haji al-mabrur artinya yang mendapatkan kebaikan, haji yang diterima Allah SWT. Atau dalam bahasa sederhana, haji mabrur adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau pelakunya menjadi lebih baik.

Status mabrur, kata Mahmudi Asyari (2010), memang hanya ada dalam ibadah haji. Oleh karena itu, haji seharusnya memberi implikasi kepada orang yang menunaikannya. Menurut sebuah hadis Nabi SAW, ada tiga ciri orang yang telah mendapatkan haji mabrur. Pertama, menebarkan kedamaian (ifsa al-salam), Kedua, meningkatkan ibadah, dan Ketiga, meningkatkan kedermawanan.

Melalui momentum ibadah haji, sudah saatnya umat muslim ólebih-lebih yang sudah menunaikan ibadah hajióintrospeksi diri. Mereka harus mengkaji ulang apakah sudah menjadi "orang baik" atau belum. Jika mereka merasa tidak ada perubahan setelah berhaji, tentu predikat mabrur itu tidak bisa digapai. Dan itu artinya, semua jerih payah ketika menunaikan ibadah haji, menjadi sia-sia di hadapan Allah SWT.

Akhirnya, semoga jamaah haji kita memperoleh predikat haji mabrur dari Allah SWT, yang termanifestasi dari perilaku memuliakan kaum perempuan, membawa perdamaian dan kebaikan kepada sesama dan seluruh alam ini. (24)

—Siti Fathimatuz Zahroh AMG, ibu rumah tangga, alumnus SMA MTA Surakarta.

BERITA 21

26 Oktober 2011

PERGESERAN MAKNA CANTIK

- Oleh Misbahul Ulum

SELAMA ini, dalam pandangan masyarakat luas, kata "cantik" selalu didentikkan dengan sosok wanita yang berkulit putih, bertubuh langsing, memiliki hidung mancung dan lain sebagainya, yang tolok ukurnya didasarkan pada kondisi fisik perempuan semata.

Kecantikan tidaklah cukup hanya diukur dari aspek lahiriah (fisik) seseorang saja. Akan tetapi, kecantikan yang sesungguhnya terletak pada kepribadian seseorang yang terwujud dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yaitu kecantikan yang lahir dari dalam diri seseorang (inner beauty).

Pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa cantik itu putih sangat dipengaruhi oleh kekuatan media dalam mengkonstruksi kecantikan. Media massa sebagai pembentuk opini publik, secara tidak langsung telah menimbulkan kegelisahan pada sebagian besar wanita. Khususnya mereka yang tak berkulit putih. Bagaimana tidak, setiap iklan produk kecantikan yang di blow up oleh media massa, selalu menampilkan sosok wanita-wanita yang berkulit putih dan bertubuh langsing. Belum lagi dengan begitu banyaknya produk-produk kecantikan yang mengusung tema whitening, yang semakin menguatkan anggapan mereka bahwa wanita

yang cantik adalah yang berkulit putih.

Pergeseran Makna

Sesungguhnya kecantikan itu adalah milik setiap wanita. Tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang berhak mengklaim bahwa kecantikan itu hanya milik satu golongan saja. Wanita yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsung bahkan hitam sekali pun sama-sama berhak menjadi cantik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cantik itu bermakna indah, elok dan rupawan. Kemudian dalam penerapannya, pemaknaan seseorang terhadap kecantikan itu berbeda dan bahkan selalu berubah dari waktu ke waktu. Konsep kecantikan seseorang di daerah tertentu boleh jadi berbeda dari konsep kecantikan seseorang di daerah lain.

Dulu, pada zaman kekaisaran Romawi, wanita cantik adalah wanita yang bertubuh gemuk, wanita yang subur, sehingga tak heran jika Julius Caesar jatuh cinta pada Cleopatra, yang menurut sejarah adalah wanita yang betubuh subur. Pada masa berikutnya, pemaknaan cantik mulai bergeser. Cantik itu kemudian dimakanai sebagai wanita yang memiliki tubuh langsing dan berkulit putih.

Sekarang, kepemilikan tubuh langsing dan kulit putih sepertinya tak lagi dijadikan ukuran mutlak seseorang disebut cantik. Dengan terpilihnya Leila Lopes sebagai Miss Universe 2011, dominasi makna cantik itu putih telah terkikis dengan sendirinya. Seperti diketahui bahwa Miss Universe adalah ajang kontes kecantikan wanita sejangad yang dijadikan referensi utama dalam memaknai kecantikan, dan ternyata Lopes mampu membuktikan kepada dunia bahwa wanita berkulit hitam sekali pun adalah cantik.

Hakikat Cantik

Berkaca dari ajang Miss Universe yang menobatkan Lopes sebagai ratu kecantikan sejangad itu, dapat ditafsirkan bahwa hakikat cantik adalah kepemilikan kemampuan-kemampuan tertentu yang membuat seseorang wanita itu benar-benar menjadi wanita seutuhnya, menjadi wanita yang anggun, sopan, dan memiliki tingkah laku yang baik. Yang ukuran-ukuran kecantikan itu didasarkan pada aspek kepribadian, bukan fisik. Kecantikan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang bersumber dari hati, kemudian terefleksikan dalam tindakan nyata. Inilah yang disebut dengan inner beauty.

Persepsi yang mendasarkan kecantikan pada aspek lahiriah harus segera didekonstruksi. Karena jika tidak, persepsi seperti itu akan mengakibatkan diskriminasi yang kian tajam dan bisa menumbuhkan sikap rasisme.

Warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, dan aspek-aspek lahiriah lainnya adalah sesuatu yang terbentuk secara alamiah. Tidak fair manakala kecantikan hanya diukur dari aspek lahiriah semata, karena secara fisik, antara manusia satu dengan yang lain itu berbeda, dan itu adalah sebuah keniscayaan dan rahmat.

Oleh karena itu, makna kecantikan sekarang ini harus mulai diarahkan pada aspek ruhaniah

seseorang (inner beauty). Kecantikan yang sesungguhnya harus bisa memberikan energi positif bagi sekitarnya, sehingga kriteria kecantikan akan berubah dari yang berkulit putih dan bertubuh langsing menjadi seseorang yang memiliki kemampuan dan prestasi tinggi, yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, memiliki perilaku yang baik, mau menolong terhadap sesama dan lain sebagainya. Kemudian, inner beauty itu dengan sendirinya akan terpancar dari seorang wanita yang dalam tingkah laku sehari-harinya mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW, bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari suara dan dari wajahnya (jasad), melainkan Ia melihat hati dan perilakunya". Hadis ini dengan tegas menerangkan bahwa kriteria fisik tidak menjadi penentu dalam menilai seseorang. Akan tetapi yang menjadi penentu dan dijadikan kriteria untuk menilai dan membedakan kualitas seseorang adalah hati dan perilakunya.

Jika pemaknaan kecantikan seperti ini disadari dan kemudian diimplementasikan oleh setiap wanita, maka tidak ada lagi kekhawatiran bagi wanita untuk tidak bisa menjadi cantik. Justru melalui pemaknaan seperti ini, setiap wanita bisa menjadi cantik suutuhnya. Dan pada akhirnya figur-figur yang dijadikan referensi sebagai wanita cantik adalah sosok seperti Siti Khadijah, Bunda Teresa, RA Kartini, Dewi Sartika, dan wanita-wanita lain yang mendedikasikan hidupnya untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekelingnya. (24)

—Misbahul Ulum, instruktur HMI Cabang Semarang, Senat Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

BERITA 22

09 November 2011

KEPAHLAWANAN PEREMPUAN

- Oleh Siti Muyassarotul Hafidzoh

PERINGATAN Hari Pahlawan setiap 10 November selama ini diperingati dengan penuh bias. Yang selalu ditampilkan sebagai pahlawan selama ini hanya laki-laki, sementara kaum hawa masih berada di pinggir perdebatan kepahlawanan.

Kisah perjuangan perempuan sering absen dikabarkan publik, sehingga tidak ada blue print yang bisa didengarkan untuk membuka lembaran baru kepahlawanan perempuan. Seolah masih tabu perempuan dilibatkan dalam proses kepahlawanan.

Apa yang terjadi ini merupakan jebakan suatu ideologi yang menempatkan perempuan hanyalah sebagai istri yang baik dan ibu yang baik. Sebagai istri yang baik, perempuan harus mengikuti semua keinginan suami. Perempuan harus bisa berhias diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi suami. Salah sedikit saja dalam berhias, bisa didamprat dan dihardik suami, kemudian dicap sebagai istri yang tidak baik. Sebagai ibu yang baik, perempuan harus bisa menghasilkan keturunan dan mendidiknya dengan sabar. Kalau tidak bisa memberikan keturunan, maka bukanlah sosok perempuan yang baik. Demikian juga kalau tidak bisa mendidik anak, maka dikatakan perempuan tidak baik. Walaupun ada kesalahan yang terjadi pada diri anak, maka sang ibu dikatakan tidak bisa mendidik dan tidak sabar melayani keinginan anak. Semua kesalahan selalu ditimpakan kepada ibu.

Jebakan ideologi ini menjadikan perempuan harus patuh tanpa reserve kepada suami. Perkataan dan perintah suami menjadi sabda yang wajib dijalankan tanpa bantah. Superioritas laki-laki inilah yang mengakibatkan perempuan harus tunduk berada dalam rumah.

Ibu Kehidupan

Ideologi ini menjadikan perempuan hanya bertugas di dalam rumah. Ruang publik di luar rumah menjadi "ruang haram" untuk dihindangi. Karena tugas-tugas di rumah sudah menumpuk, maka kiprah di ruang publik sangat terbatas. Perempuan akhirnya meringkuk tak berdaya dengan jalan hidupnya. Gerakan feminisme merupakan wujud dekonstruksi atas pola tata kelola rumah tangga yang kaku. Sekat-sekat yang begitu kuat memaksa kaum perempuan untuk bertekuk lutut dalam pekerjaan rumah tangga. Proses dekonstruksi yang terjadi dewasa ini mewujudkan upaya serius kaum perempuan untuk semakin bisa memaknai ruang publik secara kritis.

Perempuan merupakan ibu kehidupan. Dari rahim perempuan, kehidupan juga dilahirkan, kehidupan diperjuangkan, dan kehidupan mendapatkan hakikat dan martabat. Peradaban dunia tak bisa hidup dengan penuh kebanggaan tanpa hadirnya sosok perempuan.

Nafas perempuan selalu menghadirkan kedamaian, kesejukan, dan ketenteraman. Para guru bijak zaman kuno (900-200 SM) mewartakan bahwa perempuan merupakan sosok pembela rasa; mengedepankan cinta, keadilan, kemanusiaan, kesederajatan, dan melampaui egoisme dan egosentrisme.

Sosok semisal Zoroaster, Buddha, Socrates, Konfusius, dan Yeremia, Mistikus Upanishad, Mensius dan Euripedes, menjadi teladan di zamannya karena mewartakan bela rasa terhadap perempuan. Musa, Isa, Muhammad, dan para guru bijak menjadikan perempuan sebagai tulang punggung negara. Bagi mereka, kalau perempuan baik, maka negara menjadi sejahtera. Akan tetapi kalau perempuan rusak, maka negara menjadi hancur dan berantakan.

Sejarah umat manusia menempatkan perempuan sangat luhur. Walaupun juga sejarah umat manusia telah menempatkan perempuan dalam jalan yang nista dan buruk. Sejarah memang bukan linier. Akan tetapi ruh perempuan selalu menghiasi jalannya peradaban dengan penuh rasa. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa yang dicari Adam ketika diciptakan Tuhan, tak lain adalah perempuan. Dari Hawa, Adam mendapatkan kehidupan, sehingga perjalanan hidupnya di masa berikutnya bisa semakin sempurna lewat kehadiran anak-anaknya. Hawa adalah ibu kehidupan bagi Adam.

Di Indonesia, menurut pengakuan Pramoedya Ananta Toer, bukan siapa-siapa yang telah meletakkan batu sejarah modern Indonesia. Bagi Pram, Kartini adalah orangnya. Pram mengatakan bahwa "Kartini adalah pemula dari sejarah modern Indonesia. Dialah yang menggodok aspirasi-aspirasi kemandirian yang ada di Indonesia untuk pertama kali timbul di Demak-Kudus-Jepara sejak pertengahan kedua abad yang lalu (XIX). Di tangannya, kemajuan itu dirumuskan, dirincinya dan diperjuangkannya, untuk kemudian menjadi milik seluruh bangsa Indonesia."

Bukan berarti mengesampingkan Budi Utomo (1908) dan gerakan lainnya, tetapi Pram melihat bahwa peran Kartini sebagai perempuan telah menandai permulaan dalam sejarah modern Indonesia.

Dari Kartini, kaum perempuan Indonesia mampu bangkit dan menyusun gerakan yang "menghidupkan" Indonesia. Kartini menjadi rahim bagi lahirnya gerakan "kehidupan" perempuan. Dan gerakan-gerakan kehidupan perempuan menandai lahirnya "kehidupan Indonesia" itu sendiri. Ini bukanlah simplifikasi atau mengesampingkan yang lain, tetapi hakikat peradaban yang terbangun lewat gerakan kehidupan kaum perempuan memang menandai Indonesia modern yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Dengan etos kepahlawanan sebagai ibu kehidupan, sudah saatnya perempuan berani mengambil alih gerakan peradaban di masa depan, karena wajah kusam peradaban sudah capai dengan otoritarianisme kaum laki-laki yang pongah. Keindahan dan kebijaksanaan kehidupan yang lahir dari rahim perempuan harus disebarluaskan kepada publik. Bunda Teresa dari India telah memulai menampakkan dirinya kepada dunia bahwa kehadiran perempuan bisa mengobati kusamnya kehidupan. Bunda Teresa selalu tampil dengan wajahnya yang sejuk membawa air kehidupan kepada bangsanya. Gerakan Bunda Teresa tanpa memandang kasta dan kelas sosial. Bunda Teresa hadir untuk membela cinta dan kemanusiaan. Perempuan Indonesia di abad ke-21 saat ini berpeluang sangat besar untuk mencatatkan kisah suksesnya dalam mengisi peradaban dunia. (24)

—Siti Muyassarotul Hafidzoh, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

BERITA 23

15 November 2011

KDRT, TERSEMBUNYI DAN MENGHANCURKAN

- Oleh Tri Marhaeni Pudji Astuti

KEKERASAN dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah masalah baru. Tampaknya usianya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Ketika pemerintah mengesahkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, muncul harapan pastilah tak ada lagi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Ternyata harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kasus KDRT masih berseliweran dalam pemberitaan media massa, dengan berbagai ragam, pola, jenis, dan bentuk penyelesaiannya.

Sebenarnya UU NO 23 tahun 2004 bukanlah alat atau senjata para istri untuk ”memenjarakan” para suami yang melakukan kekerasan. Undang-Undang ini tujuan utamanya adalah mewujudkan keharmonisan rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan yang nondiskriminatif. Artinya, siapa pun, baik suami maupun istri dan orang-orang yang mempunyai hubungan saudara dan tinggal dalam lingkup satu rumah tangga, boleh saja mengacu pada UU No 23 tahun 2004, jika mereka mengalami KDRT.

Jadi, sangat salah jika Undang-Undang tersebut hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja. Faktanya yang dapat melakukan kekerasan adalah bisa saja laki-laki atau perempuan. Korbannya juga bisa laki-laki atau perempuan.

Mengapa seolah-olah UU No 23 tahun 2004 diperuntukkan bagi kaum perempuan? Karena secara statistik korban terbanyak adalah perempuan. Namun undang-undang ini tidaklah diskriminatif. Laki-laki yang mengalami KDRT juga boleh memakainya.

Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial tentang kekerasan dalam rumah tangga belum beranjak dari pandangan yang

sangat patriarkat. Kesan bahwa perempuan/istri adalah "milik" laki-laki —maka bebas diperlakukan apa saja oleh pemiliknya— menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Konstruksi sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan adalah karena kesalahan perempuan itu sendiri, yang dinilai sangat dominan dalam menciptakan peluang dan kesempatan, menandakan bahwa budaya patriarkat dan pemahaman masyarakat belum bergeser dari blue-print yang ada.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap siapa saja, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk kejahatan kemanusiaan dan pengingkaran hak-hak atas sekelompok manusia yang menjadi korban. Banyak kendala dalam mengungkap kasus KDRT karena kasusnya bagaikan lingkaran surga dan neraka. Terkadang pada siang hari menjadi neraka bagi korban, malam hari justru pelaku menciptakan surga, sehingga melemahkan korban (yang umumnya perempuan). Masih ditambah berbagai persoalan lain, seperti tekanan keluarga, tetangga, atasan, status sosial, prestise, jabatan, pendidikan, sehingga makin menambah sulitnya korban memutus lingkaran tersebut.

Menghancurkan

Berbagai macam bentuk KDRT yang dialami korban, dan ini adalah fenomena seperti "antara ada dan tiada" menjadi hal yang sangat menghancurkan. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan merasa mengalami banyak tekanan psikis, yang tak jarang tekanan ini akan menghancurkan dirinya secara fisik dan psikis.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menyanggah beban slogan "ibu rumah tangga yang baik", "istri yang setia dan patuh pada suami", "istri yang menjaga kehormatan keluarga", serta berbagai slogan lain yang menempatkan posisi perempuan pada sudut untuk selalu mengalah dan nrima.

Beratnya beban slogan yang disandang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadikan mereka mengalami tekanan mental, depresi dan gamang dalam bertindak. Tak jarang mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan mungkin juga sampai mengalami gangguan jiwa.

Terlebih lagi jika yang dialami perempuan adalah kekerasan psikis yang susah untuk dibuktikan tapi mereka mengalaminya. Seperti penghinaan dari suami yang terus menerus, pengingkaran eksistensi, cemoohan, dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Hal ini semakin membuat para perempuan seperti orang linglung tak tahu harus berbuat apa. Bentuk dan dampak KDRT memang beragam. Dampak fisik mungkin akan dapat disembuhkan dengan pertolongan rekonstruksi medis, akan tetapi dampak psikis akan sulit disembuhkan, tak jarang masih membekas dan menimbulkan trauma. Sementara para korban berkutat dengan penderitaannya, di pundaknya tetap harus disandang slogan yang indah-indah tersebut. Ini persoalan berat bagi perempuan.

Ancaman lain bagi korban KDRT ketika mereka berani melaporkan kasusnya adalah banyaknya tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan status mereka, dengan kedudukan mereka, dan dengan kelas mereka. Tekanan dan ancaman seringkali diterima perempuan korban KDRT yang berani melaporkan kasusnya, sehingga mereka terpaksa mencabut laporannya, meskipun sudah diproses oleh kepolisian.

Bagi saya, tetap kepentingan korban yang harus dinomorsatukan. Kalau pencabutan laporan memang membawa kebaikan dan perubahan yang berdampak terjadinya keharmonisan bagi rumah tangga korban, maka saya mendukung. Dan saya pikir aparat kepolisian juga mendukung. Namun ternyata banyak kasus pencabutan laporan adalah karena tekanan, ancaman terhadap korban KDRT. Inilah yang saya tidak mendukung. Artinya bentuk-bentuk ancaman, tekanan, dan penganiayaan adalah bentuk-bentuk kejahatan hak asasi manusia, sehingga ini yang harus ditangani, agar rasa keadilan korban terlindungi. (24)

—Tri Marhaeni Pudji Astuti, dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Unnes.

BERITA 24

07 Desember 2011

DIBUTUHKAN, LAKI-LAKI YANG FEMINIS

- Oleh Gery Sulaksono

DALAM diskursus feminisme, laki-laki seringkali ditempatkan pada posisi pelaku di hampir semua tindakan subordinasi terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, pencetus peraturan antiperempuan (Perda batasan aktivitas perempuan di malam hari), politik bias gender (seperti tes keperawanan, kecaman terhadap rokit mini), seksisme (diskriminasi atas dasar jenis kelamin), dan sebagainya. Semua situasi tersebut kita kenal dengan sebutan kultur patriarkat, yaitu kultur yang berangkat dari dominasi laki-laki atas perempuan.

Bahkan lebih jauh, gerakan feminisme radikal menganggap laki-laki adalah musuh (enemy). Kaum feminis radikal beranggapan bekerja sama dengan laki-laki seperti *sleeping with the enemy*, karena menurut mereka sumber penindasan perempuan adalah laki-laki itu sendiri, sehingga para feminis radikal mengambil sikap konfrontatif terhadap laki-laki. Padahal jika ditelisik lebih jauh, perempuan juga berpotensi melanggengkan nilai patriarkat jika dia kurang mempunyai perspektif tentang keadilan gender.

Kesalahan fatal feminisme radikal ini karena menjadikan laki-laki bukan lagi sebagai mitra atau partner dalam hal mewujudkan keadilan gender, tetapi sebagai rival atau musuh. Sikap feminisme radikal ini mendapatkan kritikan sangat luas, baik dari internal maupun dari luar kalangan feminis.

Posisi berhadapan-hadapan (*vis a vis*) antara perempuan dan laki-laki yang diajukan oleh feminisme radikal tersebut berpotensi mendatangkan sikap fobia feminisme. Fobia ini berangkat dari asumsi bahwa feminisme mengajarkan pemikiran antikepatuhan terhadap laki-laki.

Padahal, masyarakat secara otomatis telah melekatkan status laki-laki sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Bahkan banyak posisi strategis yang dimiliki oleh kaum laki-laki seperti di bidang pemerintahan, perusahaan ataupun di masyarakat.

Ketiadaan perspektif tentang keadilan gender pada seorang laki-laki dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pengambilan keputusan yang bias gender, serta sikap-sikap yang mengarah pada tindakan subordinasi perempuan.

Untuk itu, perlu lebih menempatkan laki-laki sebagai relasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, dengan jalan melibatkan laki-laki dalam hal perbincangan tentang isu-isu gender dan feminisme, sehingga maksud dan tujuan mulia dari pemikiran feminisme tidak hanya tersampaikan pada perempuan, tapi juga pada laki-laki.

Perlunya dukungan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender bukan karena perempuan lemah, sehingga harus dibantu laki-laki, namun dikarenakan prinsip bahwa semua manusia kedudukannya setara, sehingga laki-laki yang mendukung perempuan karena punya impian akan dunia yang setara dan lebih adil.

Laki-laki Feminis

Seiring berkembangnya teori feminisme, ada istilah laki-laki feminis (male feminist). Menurut Kris Budiman (2008), laki-laki feminis menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (baik secara fisik maupun psikologis), menentang pencitraan negatif perempuan baik di dalam media maupun budaya.

Batasan laki-laki feminis ini adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki namun meyakini nilai-nilai feminisme pada umumnya. Pada titik ini, definisi feminis akhirnya tidak merujuk pada jenis kelamin, akan tetapi lebih kepada pengikatan terhadap nilai-nilai feminisme.

Spirit perjuangan keadilan dan kesetaraan perempuan dapat dilakukan oleh siapa pun termasuk laki-laki, karena istilah tersebut bergerak pada tataran kesadaran. Gagasan laki-laki feminis lebih efektif di kampanyekan di semua lini kehidupan, karena yang harus diubah adalah mindset laki-laki, sehingga mampu merepresentasikan sikap-sikap yang menghargai dan menghormati hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa tokoh Indonesia yang sering disebut-sebut sebagai representasi laki-laki feminis adalah Prof Arief Budiman, Dr Mansour Fakih, Dede Oetomo PhD dan lain-lain. Karena pemikiran dan pengkajian mereka terhadap diskursus gender dianggap turut serta memberi perkembangan bagi kesetaraan perempuan di masyarakat.

Selain batasan dari Kris Budiman di atas, tidak sulit sebenarnya mengidentifikasi ciri-ciri laki-laki yang dikategorikan feminis laki-laki, misalnya memiliki rasa peduli dan toleran, menafkahi istri, baik secara ekonomi maupun biologis, antipoligami, menggairahkan dalam aktivitas seksual, peduli hak reproduksi dan lainnya.

Dengan alasan untuk meredam penindasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga hari ini, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di dalam masyarakat, setiap laki-laki dapat mengambil bagian perjuangan dengan jalan mengambil sikap atau tindakan yang lebih properempuan. Maka secara otomatis, laki-laki tersebut layak disebut sebagai laki-laki feminis, yaitu laki-laki yang telah sadar dan peduli atas hak-hak perempuan. (24)

—Gery Sulaksono SSos, alumnus Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Peminat kajian post-feminisme.

BERITA 25

28 Desember 2011

KONTROVERSI HUKUM NIKAH SIRI

- Oleh Khoirul Muzakki

FENOMENA nikah siri semakin menjadi. Di sisi lain, kontroversi hukum nikah siri tak pernah tuntas, sebab di dalamnya melibatkan berbagai unsur kepentingan dan keinginan. Beberapa berlomba mencari legitimasi untuk menghalalkan nikah siri.

Nikah siri merupakan pernikahan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak dicatat dan diawasi oleh pejabat negara (KUA). Ketentuan "sah" menurut agama ini ternyata berlawanan dengan ketentuan hukum nasional. Pernikahan siri dinyatakan "tidak sah" karena menyimpang dari UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan.

Karena tidak sah, negara "angkat tangan" terhadap risiko pernikahan siri. Negara tak bisa memberikan perlindungan hukum kepada korban nikah siri, karena tidak ada bukti hukum berupa pencatatan.

Istri dari perkawinan siri dianggap istri tak sah. Karenanya, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, serta tidak berhak atas harta gono-gini. Begitu juga dengan anak hasil perkawinan siri, ia bukan merupakan anak sah. Statusnya sama dengan anak luar kawin, atau anak hasil zina. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tak berhak atas nafkah, biaya pendidikan, atau warisan dari ayahnya.

Meski konskuensi hukum tegas, fenomena nikah siri masih berkembang. Masalahnya, ada "pertentangan" antara hukum Islam dengan hukum nasional. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, hukum Islam berpengaruh kuat dalam menuntun praktik keberagamaan umat Islam di Indonesia. Padahal, hukum nasional dan hukum Islam, keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan. Keduanya mesti dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Tanpa pertentangan.

Persoalannya, di satu sisi persoalan nikah siri membutuhkan ketegasan hukum, baik dari negara maupun agama. Di sisi lain, nikah siri justru dilakoni kalangan elite hukum baik dari institusi negara maupun lembaga keagamaan.

Diskriminasi Gender

Terlepas dari perdebatan hukum, nikah siri nyata-nyata membawa petaka pada akhirnya. Terutama bagi perempuan. Sebab pada akhirnya menjurus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Antara lain, kekerasan psikologis. Misalnya, istri mendapat stigma "istri simpanan" sehingga sulit untuk bersosialisasi. Istri juga sewaktu-watu bisa ditinggal sang suami pergi begitu saja, atau menikah lagi, karena tidak adanya ikatan hukum. Atau, kekerasan ekonomi, misal, istri tidak dinafkahi. Di samping, kekerasan fisik atau seksual yang biasa terjadi.

Nikah siri juga sarat diskriminasi dan ketidakadilan gender ada perempuan. Diskriminasi gender bisa terjadi baik secara langsung, maupun tak langsung, seperti melalui aturan, atau kebijakan

diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Atau diskriminasi sistemik, karena sudah mengakar dalam sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat yang mewariskan keadaan diskriminatif. (Fakih Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial: 1996)

Menurut Masdar Mas'udi, dalam buku Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, ketidakadilan dan diskriminasi gender berawal dari pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotype) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Karena stereotip tersebut, perempuan sering dimanfaatkan laki-laki. Antara lain, perlakuan seksual yang menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Nikah siri merupakan bentuk "penjajahan seks" untuk menunjukkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan.

Kehidupan seks yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, kenyataannya dimanipulasi manusia melalui lembaga untuk menaikkan status sosial. Misal, memiliki istri dua, tiga, atau empat untuk menaikkan gengsi. Fungsinya pun berubah menjadi pemuas naluri dasar di luar perkawinan, dan pemuas nafsu seks belaka. (Gani Abdullah, Seks, Gender dan Reproduksi Perempuan :2001).

Wajib Catat

Perdebatan hukum nikah siri berpangkal pada masalah "pencatatan" perkawinan. Fikih tidak mengharuskan adanya pencatatan, sebab itu tidak termasuk syarat atau rukun pernikahan. Di sisi lain, negara juga punya tugas menertibkan masyarakatnya untuk mencapai kebaikan umum.

Sebagai warga negara yang baik, wajib mengikuti peraturan pemerintah. Sebagai umat yang berakal, tentu tidak begitu saja taklid terhadap ketetapan hukum fikih yang masih menyisakan ruang interpretasi. Penting sosialisasi hukum kepada masyarakat, bukan hanya bentuk rumusan hukum normatifnya saja, namun, terutama tentang aspek tujuan hukum (maqasid asy-syariah). Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan perumusannya (Allah SWT). Secara umum, tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Berpijak dari tujuan "meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan", maka pencatatan perkawinan seharusnya dihukumi "wajib".

Fungsi pencatatan di samping untuk mencapai ketertiban umum, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Jika suatu saat terjadi pengingkaran perkawinan, negara bisa memberikan sanksi hukum bagi yang bersangkutan. Pencatatan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam perkawinan.

Di tengah terjadinya desakralisasi, serta merosotnya kualitas keagamaan umat Islam saat ini, sanksi saja tidak cukup. Perlu bukti otentik untuk menjamin kelangsungan perkawinan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Allah sendiri memerintahkan untuk mencatatkan setiap transaksi (utang piutang) yang dilakukan oleh hambanya. (QS Al Baqarah:282).

Jika dalam transaksi hutang piutang saja wajib dicatatkan, apalagi dalam pernikahan yang bukan sekadar transaksi biasa. Ia merupakan ritus sakral yang di dalam Alquran disebut sebagai suatu akad atau perjanjian yang kuat "mitsaqan ghalidzan" (An Nisa:21).

Di tengah kemudahan pengurusan administrasi perkawinan saat ini, tak ada alasan bagi setiap

warga untuk tidak mencatatkan perkawinannya. (24)

—Khoirul Muzakki, Pemimpin Umum Surat Kabar Mahasiswa Amanat IAIN Walisongo, aktif di Forum Peduli Perempuan.

